

Katalog BPS:



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2011





Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Agustus 2011

ISSN.

No. Publikasi:

Katalog BPS:

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: 110 halaman

Naskah: Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Sub Direktorat Statistik Ketenagakerjaan

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Invitama Abadi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Nite: Ilwww.

KATA PENGANTAR

Pada periode 2005-2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara Triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulanan I, II dan IV menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus 2011 yang terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III dan 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Sejak Februari 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia edisi Triwulan I dan kali ini hadir dengan edisi Agustus 2011 yang menggambarkan keadaan Triwulan III. Dalam publikasi ini juga disajikan Key Indicator of the Labour Market (KILM) Triwulan I Februari 2011 dan Triwulan III. Indikator-indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (early warning sytem) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, daerah perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut Provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, November 2011 Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

DR. Rusman Heriawan

Michigan Mark Control of the Control

Daftar Isi

Ka	ta Pengantar	-
Da	ftar Isi	 11
Da	ftar Tabel	V
Da	ftar Grafik	V
Da	ftar Lampiran	vi
		1X
Ringkasan Eksekutif		Xi
1.		1
	1.1. Sakernas Dan Analisis Ketenagakerjaan	1
	1.2. Sakernas dan KILM	2
	1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
	1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2.	Penjelasan Teknis	9
	2.1. Penjelasan Umum	9
	2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
	2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
	2.2.2. Indikator Pekerja	14
	2.2.3. Indikator Pengangguran, Underemployment dan Ketidakaktifan	18
	2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
	2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
	2.2.6. Produktifitas Tenaga Kerja	23
	2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
	2.2.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan	24
3.	Partisipasi Di Dunia Kerja (KILM 1)	25
4.	Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
	4.1. KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk	29
	4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
	4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37

	4.4. KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
	4.5. KILM 6. Jam Kerja	44
	4.6. KILM 7. Pekerja Sektor Informal	48
5.	Indikator Pengangguran	51
	5.1. KILM 8. Pengangguran	51
	5.2. KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda	54
	5.3. KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	56
	5.4. KILM 12. Setengah Penganggur	60
	5.5. KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan	62
6.	Indikator Pendidikan Dan Melek Huruf	65
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	65
T A	MPIR AN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Februari dan Agustus 2011
Tabel 2.	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Total Penduduk, Februari dan Agustus 2011
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Tabel 4.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Tabel 5.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Tabel 6.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Tabel 7.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Tabel 8.	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011
Tabel 9.	Pekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011
Tabel 10.	Indikator Pengangguran di Indonesia, Februari dan Agustus 2011
Tabel 11.	Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, Februari dan Agustus 2011
Tabel 12.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Tabel 13.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Tabel 14.	Indikator Setengah Penganggur, Februari dan Agustus 2011
Tabel 15.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Tabel 16.	Indikator Ketidakaktifan, Februari dan Agustus 2011
Tabel 17.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

Daftar Grafik

Grafik 1.	Pola TPAK Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 2.	TPAK Berdasarkan Provinsi Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 3.	Pola EPR Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 4.	EPR Provinsi Februari 2011 dan Agustus 2011.
Grafik 5.	Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 6.	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 7.	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu, Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011
Grafik 9.	Persentase Pekerja Menurut Jam Kerja dan Provinsi, Agustus 2011
Grafik 10.	Persentase Pekerja Menurut Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011
Grafik 11.	Persentase Pekerja Menurut Sektor (Formal/Informal) dan Provinsi, Agustus 2011
Grafik 12.	TPT Per-Provinsi Februari dan Agustus 2011
Grafik 13.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari dan Agustus 2011
Grafik 14.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Grafik 15.	Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Grafik 16.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Agustus 2011
Grafik 17.	Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 2.	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 4.	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 5.	Employment to Population Ratio (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 6.	Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 7.	Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 8.	Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 9.	Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 10.	Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011
Lampiran 11.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 13.	Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 14.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011
Lampiran 15.	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

Lampiran 16.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan,	
	Februari dan Agustus 2011	91
Lampiran 17.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan	
	Jenis Kelamin,Februari dan Agustus 2011	92
Lampiran 18	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan	
	Klasifikasi Daerah, Februari dan Agustus 2011	93
Lampiran 19.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis	
	Kelamin, Februari dan Agustus 2011	94
Lampiran 20.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan	
	Klasifikasi Daerah, Februari dan Agustus 2011	95

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK Angkatan Kerja

BAK Bukan Angkatan Kerja

BPS Badan Pusat Statistik

EPR Employment-to-Population Ratio

ICLS The International Conference of Labour Statisticians

ILO International Labor Organization

ISCED International Standard Classification of Education

ISIC International Standard Industrial Classification

KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

KILM Key Indicator of The Labor Market

MDG's Millenium Development Goals

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

SAKERNAS Survei Angkatan kerja Nasional

SP Sensus Penduduk

STP Setengah Penganggur

SUPAS Survey Penduduk Antar Sensus

TPT Tingkat Pengangguran Terbuka

TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2011 yang termasuk dalam angkatan kerja sebanyak 117,37 juta jiwa, secara absolut turun 2,03 juta jiwa dibandingkan dengan keadaan Februari 2011. Akibatnya, TPAK di Indonesia pada Agustus 2011 turun sebesar 1,69 persen poin dari 69,96 persen pada Februari 2011 menjadi 68,34 persen pada Agustus 2011.

Secara nasional, angka EPR menurun dari 65,21 persen pada Februari 2011 menjadi 63,85 persen pada Agustus 2011. Artinya, rasio jumlah orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar sekitar 2 persen poin. Angka ini bisa diinterpretasikan dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 65 orang yang bekerja pada Februari 2011, sedangkan pada Agustus 2011, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 64 orang yang bekerja.

Penurunan EPR ini terlihat terjadi pada kelompok umur 25 tahun ke atas (penduduk dewasa). Pada penduduk usia muda (15-24 tahun) justru terlihat adanya peningkatan EPR dari 38,25 persen pada Februari 2011 menjadi 40,32 persen pada Agustus 2011. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, juga terjadi kenaikan EPR baik pada laki-laki maupun perempuan.

Data Sakernas Februari 2011 menunjukkan bahwa penduduk bekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai atau penerima upah/gaji mencapai 31,01 persen, sedangkan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha hanya sebesar 3,23 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga masih relatif tinggi yaitu sebesar 33,93 persen. Masih berdasarkan Sakernas Februari 2011, di daerah perkotaan, sebagian besar penduduknya bekerja dengan upah/gaji dengan persentase mencapai 46,07 persen. Sedangkan di daerah perdesaan didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri dengan persentase sebesar 42,85 persen. Sementara itu, secara nasional, pada Februari 2011, rasio penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/vulnerable employment" terhadap total penduduk yang bekerja mencapai 65,76 persen.

Jika perekonomian dibagi menjadi 3 sektor, yaitu Pertanian, Manufaktur dan Jasa, berdasarkan komposisi sektoral, hasil Sakernas Agustus 2011 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan Februari 2011. Meskipun *shan* pertanian turun sekitar 3 persen poin, sektor ini masih menjadi sektor dominan kedua setelah jasa-jasa. Sektor jasa justru mengalami kenaikan tipis 0,49 persen dibandingkan dengan kondisi Februari 2011. Kenaikan ini terjadi karena faktor musiman, dimana pada Agustus tidak ada kegiatan panen raya, sehingga pekerja terutama pekerja informal pindah ke sektor-sektor jasa informal yang mudah untuk dimasuki. Sektor yang justru mengalami kenaikan yang relatif besar (2 persen poin) adalah sektor manufaktur, yaitu dari 18,78 persen pada Februari 2011 menjadi 20,60 persen pada Agustus 2011.

Pada Februari 2011 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 16,59 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 17 orang pekerja paruh waktu. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 59,28 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, 59 orang adalah perempuan. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing sebesar 25,06 persen dan 11,12 persen. Pada Agustus 2011 tingkat pekerja paruh waktu justru meningkat hingga mencapai 19,21 persen. Artinya dari 100 orang yang bekerja, terdapat 19

orang yang bekerja paruh waktu. Peningkatan persentase pekerja paruh waktu ini terlihat seimbang baik untuk pekerja laki-laki (dari 11,12 persen pada Februari 2011 menjadi 14,19 persen pada Agustus 2011) dan pekerja perempuan (dari 25,06 persen pada Februari 2011 menjadi 27,40 persen pada Agustus 2011). Tetapi, jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, kenaikan persentase pekerja paruh waktu justru terjadi di daerah perdesaan (dari 22,25 persen pada Februari 2011 menjadi 27,54 persen pada Agustus 2011), sedangkan di daerah perkotaan, justru terjadi penurunan, meskipun tidak berarti (dari 10,29 persen pada Februari 2011 menjadi 10,19 persen pada Agustus 2011).

Secara umum, rata-rata jumlah jam kerja hasil Sakernas Agustus 2011 lebih rendah dibandingkan dengan Sakernas Februari 2011. Hal ini diduga karena pelaksanaan Sakernas Agustus pada bulan Ramadhan dimana sebagian besar masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa. Sakernas Februari dan Agustus juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki dan terlihat pada hampir setiap pengelompokan jumlah jam kerja 35 jam per minggu ke bawah. Pada Februari 2011, persentase perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu adalah 42,72 persen, sedangkan pada Agustus 2011, persentase ini meningkat dan mencapai 44,03 persen.

Berbeda dengan komposisi jam kerja berdasarkan jenis kelamin, komposisi pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu) berdasarkan klasifikasi Desa-Kota terlihat agak berbeda. Di daerah perkotaan, proporsi pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu ternyata mengalami penurunan dari 23,65 persen pada Februari 2011 menjadi 21,76 persen pada Agustus 2011. Kenaikan justru terjadi pada daerah perdesaan dari 40,91 persen pada Februari 2011 menjadi 45,20 persen pada Agustus 2011.

Pada Sakernas Februari 2011 jumlah laki-laki yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibanding perempuan yaitu 37,8 juta orang laki-laki dan 27,1 juta orang perempuan. Pada Agustus 2011 jumlah pekerja di sektor informal yang berjenis kelamin laki-laki secara absolut turun menjadi 35,82 juta dan perempuan sebesar 24,13 juta. Penurunan ini terjadi karena secara absolut jumlah pekerja turun. Tetapi, secara proposi, memang terjadi kenaikan persentase pekerja formal yang tentunya diikuti dengan penurunan pekerja informal. Persentase pekerja sektor informal pada Februari 2011 adalah 58,37 persen, sedangkan pada Agustus 2011 menurun menjadi 54,66 persen. Sektor formal pada Februari 2011 mencapai 41,63 persen dan meningkat sekitar 4 persen poin pada Agustus 2011 menjadi 45,34 persen. Dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum pria, dimana sekitar 2/3 dari kue pekerjaan di sektor formal dipegang oleh laki-laki. Pada Februari 2011 persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal adalah 64,28 persen dan relatif tetap pada angka tersebut dengan kenaikan sangat tipis yang mencapai 64,70 persen pada Agustus 2011.

Secara konsisten dan perlahan, TPT di Indonesia mengalami penurunan dari yang semula 6,80 pada Februari 2011 menjadi 6,56 pada Agustus 2011. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki turun dari 6,42 persen pada Februari 2011 menjadi 5,90 persen pada Agustus 2011, sedangkan TPT perempuan justru meningkat tipis dari 7,38 persen pada Februari 2011 menjadi 7,62 persen pada Agustus 2011. Penurunan TPT Februari-Agustus berdasarkan klasifikasi daerah terjadi di daerah perkotaan, dimana TPT turun dari 9,02 persen pada Februari 2011 menjadi 8,23 persen pada Agustus 2011. Sedangkan di daerah perdesaan justru terjadi kenaikan TPT dari 4,70 persen pada Februari 2011 menjadi 4,96 persen pada Agustus 2011.

Pada Februari 2011, TPT usia muda (15-24 tahun) adalah sebesar 23,92 persen sedangkan pada Agustus 2011 TPT usia muda menurun menjadi 19,99 persen. Penurunan terjadi di semua klasifikasi, baik klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, maupun klasifikasi berdasarkan daerah tempat tinggal (desa-kota). TPT usia muda penduduk berjenis kelamin laki-laki pada Februari 2011 adalah 23,01 persen dan turun menjadi 19,27 persen, sedangkan TPT usia muda perempuan turun dari 25,28 persen pada Februari 2011 menjadi 21,04 persen pada Agustus 2011. Dilihat berdasarkan klasifikasi kota-desa, di daerah perkotaan terjadi penurunan TPT usia muda dari 29,30 persen pada Februari 2011 menjadi 23,12 persen pada Agustus 2011, sedangkan di perdesaan TPT usia muda turun dari 18,31 persen pada Februari 2011 menjadi 16,94 persen pada Agustus 2011.

Penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga terjadi pada periode Februari-Agustus 2011. Pada Februari 2011, dari 100 orang penduduk yang bekerja 14 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 12 orang setengah penganggur per 100 penduduk bekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, penurunan setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terlihat proporsional antara penduduk laki-laki dan perempuan, demikian juga jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah perkotaan-perdesaan.

Fenomena meningkatnya tingkat ketidakaktifan pada periode Februari-Agustus 2011 sebenarnya menggambarkan adanya perpindahan dari kelompok angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja meningkat sekitar 3 juta jiwa dari 51,26 juta jiwa pada Februari 2011 menjadi 54,39 juta jiwa pada Agustus 2011. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sumbangan peningkatan bukan angkatan kerja ini 82 persen diantaranya adalah perempuan (2,57 juta) dan 18 persen laki-laki (0,56 juta). Kenaikan BAK berdasarkan klasifikasi kota-desa, 68 persen merupakan pertambahan BAK di perdesaan (2,12 juta) dan sisanya (32 persen) merupakan pertambahan BAK di perkotaan (1,01 juta). Fenomena ini diduga merupakan fenomena sesaat yang berhubungan dengan ibadah puasa sebagian besar masyarakat Indonesia.

Komposisi angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tingkat dasar pada Februari 2011 adalah 62,22 persen, sedangkan pada Agustus 2011 adalah 62,02 persen. Komposisi untuk tingkat pendidikan dasar ini berdasarkan jenis kelamin terlihat agak berbeda antara Februari dengan Agustus. Pada Februari 2011 persentase angkatan kerja laki-laki yang menamatkan pendidikan dasar lebih rendah dibandingkan dengan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama. Tetapi, pada Agustus 2011 polanya justru terbalik, dimana persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan persentase angkatan kerja perempuan yang menamatkan pendidikan dasar. Hal ini diduga disebabkan karena terjadinya perpindahan perempuan dari angkatan kerja menjadi kelompok bukan angkatan kerja.

Nite: Ilwww.

1. Pendahuluan

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam usaha monitoring dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat mengambil kebijakan dalam usaha mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, mulai Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization-ILO), yaitu Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (Key Indicators of the Labor Market). ILO telah meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara Triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara Triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatkan akurasi data yang dihasilkan maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara Triwulanan yaitu; bulan Februari 2011 (Triwulan I),

Mei 2011 (Triwulan II), Agustus 2011 (Triwulan III), dan November 2011 (Triwulan IV) yang penyajian data dirancang sampai tingkat provinsi. Pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel Triwulanan juga terdapat sampel tambahan, untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Sepanjang tahun 2011 Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas Triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulanan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal baik blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi internasional (ILO) yaitu KILM. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP dan SUPAS) perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun Supas bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan dalam SP dan Supas lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, keluarga berencana dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP dan Supas maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan sampling error yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar sampling errornya.

3) Faktor Pengali

Faktor pengali yang digunakan dalam publikasi ini, berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2010 final yang diproyeksikan ke bulan Agustus 2011.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010 pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai Badan Pusat Statistik yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Mulai 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Di sisi lain, penyusunan indikator kunci ketenagakerjaan/KILM pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja.
- 2) Meningkatkan ketersedian indikator-indikator ketenagakerjaan untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja seperti underutilisasi tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (decent work) adalah langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (Decent Work).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lainnya.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), tetapi juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu pekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds norking hours* (KILM 6), pekerja sektor informal (KILM 7) dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (full employment), pekerja yang produktif dan penyediaan pekerjaan yang layak (decent nork) untuk semua. Pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDG pertama memasukkan target baru (disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDG's tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk (Employment to Population Ratio/EPR), proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (vulnerable employment), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18 dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (adjustment cost) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Adalah penting untuk menyadari bahwa pengangguran "hanya" merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi. Penduduk usia kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2) atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja, atau keduanya, menunjukkan undenutilisasi yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah

yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk aktif terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin ingin mendorong lingkungan yang memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan melalui, misalnya, pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja fleksibel bagi perempuan. Atau, program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa" / discourage worker, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak ada pekerjaan yang sesuai yang tersedia bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), usia (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10) dan tingkat pendidikan (KILM 11) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat. Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, seperti latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, dll, juga penting untuk dianalisa, jika data karakteristik tersebut tersedia, untuk menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah. Di negara-negara berkembang dengan skema perlindungan sosial atau bila tabungan atau cara lain dukungan yang tersedia, pekerja yang lebih baik mampu untuk meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja. Hal ini membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah premis bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran

normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa pekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/ karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan apakah pekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6) atau ingin menambah jam kerja (KILM 12).

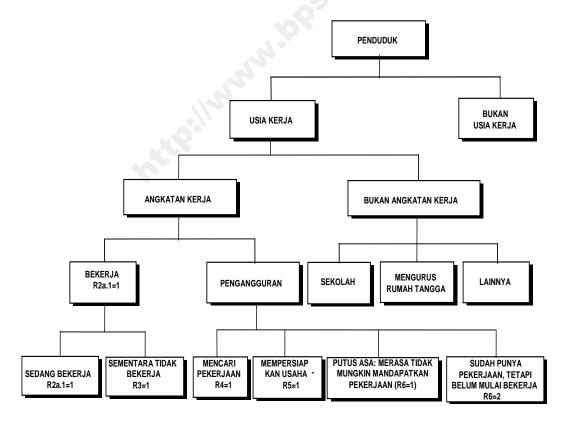
2. PENJELASAN TEKNIS

Pada sub bab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep/definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi International Labor Organization (ILO) sebagaimana tercantum dalam buku "Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment" An ILO Manual on Concepts and Methods, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, usia kerja, periode referensi dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sehari sebelum pencacahan.

Usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (economically active population) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturutturut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/ pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu

yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata' seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (a short recent reference period) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (recall) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal Kriteria Satu Jam. Kriteria satu jam digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (short-time work), pekerja bebas, stand-by work dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di

mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*) dari jumlah jam kerja dinaikkan maka akan mengubah definisi penganggur yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan the one hour criterion, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai employed (bekerja). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu" untuk mengkategorikan seseorang (currently economically active population) sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja

Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization-ILO) meluncurkan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja/KILM (Key Indicator of Labor Market) pada tahun 1999 untuk melengkapi program reguler pengumpulan data dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- 1) Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja;
- 2) Indikator pekerja, terdiri dari KILM 2 (rasio pekerja terhadap jumlah penduduk), KILM 3 (penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama), KILM 4 (lapangan usaha tenaga kerja), KILM 5 (pekerja paruh waktu), KILM 6 (jam kerja) dan KILM 7 (tenaga kerja di ekonomi informal);
- 3) Indikator pengangguran, *underemployment* dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (pengangguran), KILM 9 (pengangguran pada kelompok pemuda), KILM 10 (pengangguran jangka panjang), KILM 11 (pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan), KILM 12 (underemployment), dan KILM 13 (tingkat ketidakaktifan);

- 4) Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (pencapaian pendidikan dan melek huruf);
- 5) Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (indeks upah sektor manufaktur), KILM 16 (indikator upah dan pendapatan berdasarkan jabatan) dan KILM 17 (upah per jam);
- 6) Produktifitas Tenaga Kerja yang terdiri dari KILM 18 (produktifitas tenaga kerja);
- 7) Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (elastisitas tenaga kerja); dan
- 8) Indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan).

2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Beberapa konsep yang berkaitan dengan indikator ini adalah sebagai berikut:

Angkatan Kerja (AK)

Konsep angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja selama periode tertentu. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Dalam angkatan kerja terdapat penduduk yang kegiatannya adalah bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

2.2.2. Indikator Pekerja

KILM 2. Rasio Pekerja Terhadap Jumlah Penduduk/ Employment to Population Ratio (EPR)

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi

melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

- 1) Berusaha sendiri.
- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar.
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.
- 4) Buruh/Karyawan/Pegawai.
- 5) Pekerja bebas di pertanian.
- 6) Pekerja bebas di nonpertanian.
- 7) Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang berusaha, terdiri dari:
 - i. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar,
 - ii. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;

- iii. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga rasio pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan non-pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
- 7) Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu **A(griculture)**/Pertanian, **M(anufacture)**/ Manufaktur dan **S(ervices)**/Jasa-Jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), garis pemisah tersebut ditentukan, baik atas dasar negara-oleh-negara atau melalui penggunaan estimasi khusus. Tetapi, jika tidak ada kesepakatan, biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7. Tenaga Kerja Sektor Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

¹ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan².

2.2.3. Indikator Pengangguran, Underemployment dan Ketidakaktifan

KILM 8. Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (adjustment) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektorsektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

² Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

³ Tingkat pengagguran relatif rendah pada orang-orang miskin

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok pekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, *bukan* jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Pemuda

Tingkat pengangguran memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Pemuda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penangangn kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "pemuda" mencakup orang yang berusia 16 sampai 30 tahun⁴, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 31 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan,merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM 12. Setengah Penganggur

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan suka rela mencari pekerjaan tambahan yang meliputi:
 - i. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - ii. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan yang merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1 – TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai "buruk", misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25-34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat aktivitas yang relatif tinggi. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah,

dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (**ISCED-97**). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, Paket C; dan
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana dan S2/S3.

2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan pekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survey khusus (Survey Upah dan Survey Struktur Upah) ---yang bukan merupakan bagian dari Sakernas--- yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Estimasi pendapatan dapat saja dilakukan dengan menggunakan teknik statistic (*Two Step Heckman*). Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah Per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, pekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya

sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar pekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas, yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat beresiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. Produktifitas Tenaga Kerja

KILM 18. Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat produktifitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (Labor/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktifitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktifitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor yang memerlukan tenaga kerja yang banyak (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Tetapi, keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan tidak bisanya indikator ini disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Pekerja Miskin dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, pekerja miskin dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3. Partisipasi Di Dunia Kerja (KILM 1)

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Data angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk pengukuran karakteristik ekonomi.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (KILM 6th ed) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin menurut kelompok umur dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64 dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada Agustus 2011 yang termasuk dalam angkatan kerja adalah 117,37 juta jiwa, secara absolut turun 2,03 juta jiwa dibandingkan dengan keadaan Februari 2011. Akibatnya, TPAK di Indonesia pada Agustus 2011 turun sebesar 1,62 persen poin dari 69,96 persen pada Februari 2011 menjadi 68,34 persen pada Agustus 2011.

Jika didekomposisi berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi daerah, terjadi penurunan seiring penurunan pada TPAK nasional. Pada kelompok laki-laki, tidak terjadi penurunan yang signifikan, yaitu dari 84,86 persen pada Februari 2011 menjadi 84,30 persen pada Agustus 2011. Tetapi, untuk perempuan terjadi penurunan sekitar 3 persen poin pada TPAK, yakni dari 55,13 persen pada Februari 2011 menjadi 52,44 persen pada Agustus 2011. Hal serupa terjadi pada kelompok-kelompok umur penting, kecuali pada kelompok umur 15-24 (Usia Muda), yang mengalami sedikit kenaikan dari 50,28 persen pada Februari 2011 menjadi 50,40 persen pada Agustus 2011.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Februari dan Agustus 2011

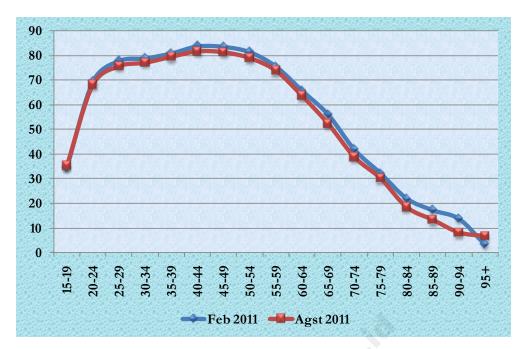
Indikator	Februari	Agustus
Jumlah Penduduk 15+ (juta)	170,66	171,76
Laki-laki	85,16	85,71
Perempuan	85,50	86,05
Perkotaan	85,70	86,18
Perdesaan	84,95	85,57
Jumlah Angkatan Kerja (juta)	119,40	117,37
Laki-laki	72,26	72,25
Perempuan	47,14	45,12
Perkotaan	57,94	57,41
Perdesaan	61,46	59,96
TPAK (persen)	69,96	68,34
Laki-laki	84,86	84,30
Perempuan	55,13	52,44
Perkotaan	67,60	66,61
Perdesaan	72,35	70,07
TPAK 15-24 (persen)	50,28	50,40
Laki-laki	59,81	59,66
Perempuan	40,64	41,03
Perkotaan	48,98	49,66
Perdesaan	51,71	51,13
TPAK 15-64 (persen)	72,06	70,59
Laki-laki	86,67	86,34
Perempuan	57,30	54,65
Perkotaan	69,64	69,03
Perdesaan	74,58	72,16
TPAK 25-54 (persen)	80,81	78,83
Laki-laki	97,48	97,21
Perempuan	63,98	60,25
Perkotaan	78,84	77,44
Perdesaan	82,87	80,24
TPAK 25-34 (persen)	78,41	76,43
Laki-laki	97,02	96,92
Perempuan	59,81	55,91
Perkotaan	77,88	76 , 60
Perdesaan	79,00	76,25

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Februari dan Agustus 2011 (Lanjutan)

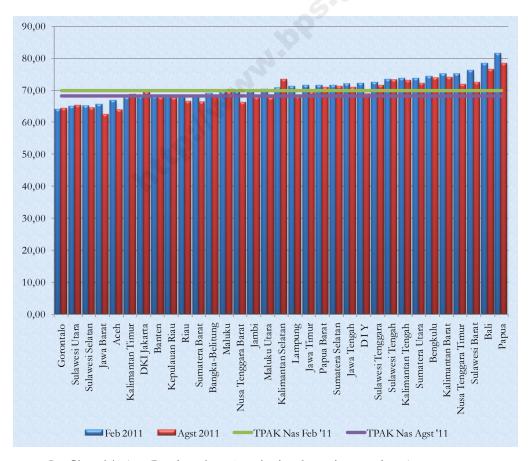
Indikator	Februari	Agustus
TPAK 35-54 (persen)	82,44	80,46
Laki-laki	97,80	97,40
Perempuan	66,84	63,23
Perkotaan	79,53	78,01
Perdesaan	85,34	82,93
TPAK 55-64 (persen)	71,44	69,58
Laki-laki	85,82	85,21
Perempuan	56,86	53,61
Perkotaan	63,74	63,98
Perdesaan	77,91	75,13
TPAK 65+ (persen)	41,78	38,70
Laki-laki	57,62	54,07
Perempuan	28,80	26,24
Perkotaan	34,16	34,11
Perdesaan	47,19	43,15

Perubahan pola yang jelas terlihat pada grafik TPAK berdasarkan kelompok umur. Terlihat terjadinya pergeseran TPAK pada kelompok-kelompok umur tua. Hal ini mengindikasikan terjadinya perpindahan penduduk dari Angkatan Kerja ke Bukan Angkatan Kerja yang terjadi pada kelompok umur tua. Puncak TPAK antara Februari 2011 dan Agustus 2011 tidak terjadi perubahan yaitu mencapai puncak pada kelompok umur 40-44 tahun.

Dari grafik juga terlihat adanya pergeseran TPAK berdasarkan provinsi-provinsi di Indonesia. Pada Februari 2011, provinsi-provinsi dengan TPAK terendah adalah Gorontalo (63,90 persen), Sulawesi Utara (64,71 persen) dan Sulawesi Selatan (65,01 persen), pada Agustus 2011 provinsi-provinsi dengan TPAK terendah adalah Jawa Barat (62,27 persen), Aceh (63,78 persen) dan Gorontalo (64,12 persen). TPAK tertinggi pada Februari 2011 adalah Sulawesi Barat (76,08 persen), Bali (78,49 persen) dan Papua (81,51 persen), sedangkan pada Agustus 2011, provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Kalimantan Barat (73,93 persen), Bali (76,45 persen) dan Papua (78,45 persen).



Grafik 1. Pola TPAK Februari 2011 dan Agustus 2011



Grafik 2. TPAK Berdasarkan Provinsi Februari 2011 dan Agustus 2011

4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (*employment to population ratio*) didefiniskan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena, di banyak negara, indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah).

Secara nasional, angka EPR menurun dari 65,21 persen pada Februari 2011 menjadi 63,85 persen pada Agustus 2011. Artinya, rasio jumlah orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan sebesar sekitar 2 persen poin. Angka ini bisa diinterpretasikan dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 65 orang yang bekerja pada Februari 2011, sedangkan pada Agustus 2011, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 64 orang yang bekerja.

Penurunan EPR ini terlihat terjadi pada kelompok umur 25 tahun ke atas (penduduk dewasa). Pada penduduk usia muda (15-24 tahun) justru terlihat adanya peningkatan EPR dari 38,25 persen pada Februari 2011 menjadi 40,32 persen pada Agustus 2011. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, juga terjadi kenaikan EPR baik pada laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Total Penduduk, Februari dan Agustus 2011

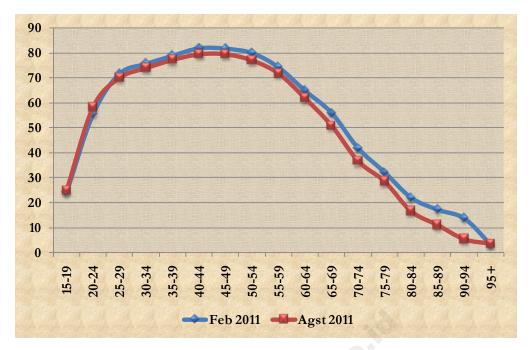
In	dikator	Februari	Agustus
Jumlah Penduduk 15+ (juta)	170,66	171,76
Laki-laki		85,16	85,71
Perempuan		85,50	86,05
Perkotaan		85,70	86,18
Perdesaan		84,95	85,57
Jumlah Penduduk Usia Mu	da (15-24) (juta)	40,92	41,46
Laki-laki		20,58	20,85
Perempuan		20,34	20,61
Perkotaan		21,45	20,72
Perdesaan		19,48	20,74
Jumlah Penduduk Dewasa	(25+) (juta)	129,73	130,30
Laki-laki		64,58	64,86
Perempuan		65,16	65,44
Perkotaan	<u> </u>	64,25	65,47
Perdesaan		65,48	64,83
Jumlah Penduduk 15+ yang	Bekerja (juta)	111,28	109,67
Laki-laki		67,62	67,99
Perempuan		43,66	41,68
Perkotaan		52,71	52,68
Perdesaan		58,57	56,99
Jumlah Penduduk Usia Mu	da (15-24) yang Bekerja (juta)	15,65	16,72
Laki-laki		9,48	10,04
Perempuan		6,18	6,68
Perkotaan		7,43	7,91
Perdesaan		8,23	8,81
Jumlah Penduduk Dewasa	(25+) yang Bekerja (juta)	95,63	92,95
Laki-laki		58,15	57,95
Perempuan		37,48	35,00
Perkotaan		45,28	44,77
Perdesaan		50,35	48,18

Tabel 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Total Penduduk, Februari dan Agustus 2011 (Lanjutan)

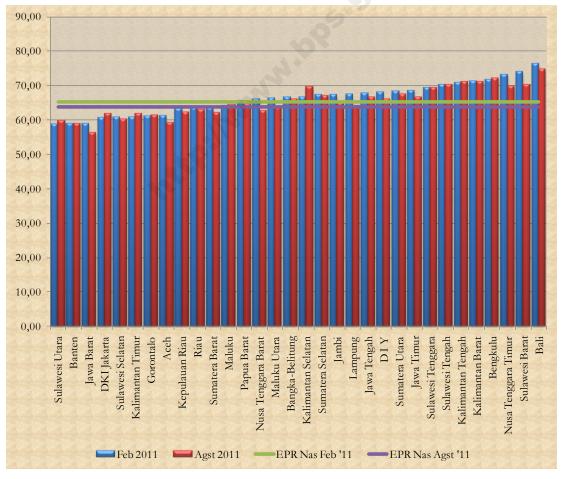
Indikator	Februari	Agustus
EPR Penduduk 15+	65,21	63,85
Laki-laki	79,41	79,32
Perempuan	51,06	48,44
Perkotaan	61,50	61,13
Perdesaan	68,94	66,60
EPR Penduduk Usia Muda (15-24)	38,25	40,32
Laki-laki	46,05	48,16
Perempuan	30,37	32,40
Perkotaan	34,63	38,18
Perdesaan	42,24	42,47
EPR Penduduk Dewasa (25+)	73,71	71,34
Laki-laki	90,04	89,34
Perempuan	57,52	53,49
Perkotaan	70,47	68,39
Perdesaan	76,89	74,32

Berbeda dengan penduduk usia muda, pada penduduk dewasa terlihat terjadinya penurunan EPR, yaitu dari 73 orang bekerja per 100 penduduk pada Februari 2011 menjadii 71 orang bekerja per 100 penduduk pada Agustus 2011. Penurunan EPR yang relatif besar terjadi pada penduduk dewasa berjenis kelamin perempuan, dimana EPR menurun sekitar 4 persen poin. Sedangkan komposisi berdasarkan Kota-Desa rata-rata menurun sekitar 2 persen poin.

Pola EPR berdasarkan kelompok umur seperti terlihat pada grafik ternyata mirip dengan pola TPAK. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen angkatan kerja. Artinya, komponen pengangguran pada angkatan kerja relatif kecil. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR juga terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun. Terlihat juga bahwa antara Februari dan Agustus grafik EPR berhimpitan hingga kelompok umur 35-39, dan mulai merenggang pada kelompok umur 40-44, dengan jarak terbesar terjadi pada kelompok umur 90-94.



Grafik 3. Pola EPR Februari 2011 dan Agustus 2011



Grafik 4. EPR Provinsi Februari 2011 dan Agustus 2011

4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Kategorisasi menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian. Kategori status pekerjaan utama pada publikasi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Pekerja dengan upah dan gaji.
- 2) Pekerja yang berusaha/wiraswasta.
- 3) Pekerja keluarga masing-masing yang dinyatakan sebagai proporsi dari total bekerja.

Data Sakernas Februari 2011 menunjukkan bahwa penduduk bekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai menerima upah/gaji mencapai 31,01 persen, sedangkan penduduk yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap atau pengusaha hanya sebesar 3,23 persen. Persentase penduduk perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga masih relatif tinggi yaitu sebesar 33,93 persen. Masih berdasarkan Sakernas Februari 2011, di daerah perkotaan, sebagian besar penduduknya bekerja dengan upah/gaji dengan persentase mencapai 46,07 persen. Sedangkan di daerah perdesaan didominasi oleh mereka yang berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri dengan persentase sebesar 42,85 persen. Sementara itu, secara nasional, pada Februari 2011, rasio penduduk bekerja yang tergolong "pekerja rentan/vulnerable employment⁵" terhadap total penduduk yang bekerja mencapai 65,76 persen.

Jika dibandingkan dengan Februari, terlihat adanya perbaikan pada indikator pekerja rentan, dimana pada Agustus 2011 terjadi penurunan persentase pekerja rentan menjadi 62,17 persen. Penurunan ini terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Penurunan persentase pekerja rentan laki-laki mencapai 3 persen poin, sedangkan untuk pekerja perempuan mencapai 4 persen poin.

_

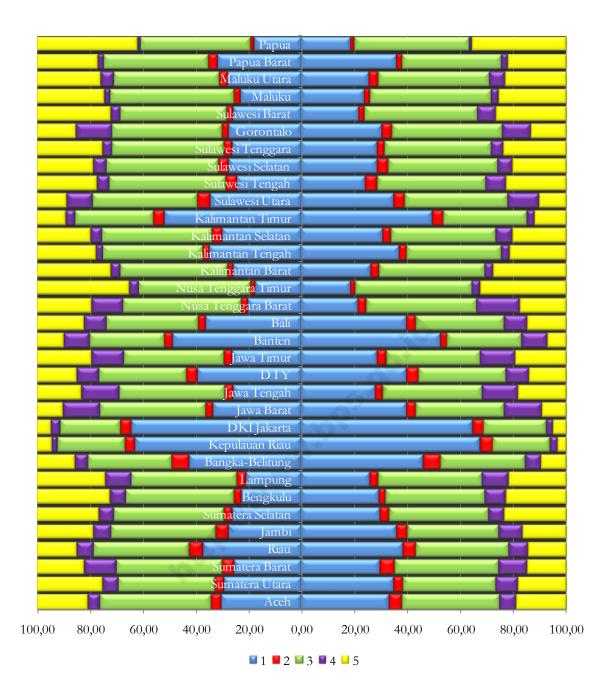
⁵ Pekerja rentan adalah pekerja dengan status berusaha sendiri, pekerja bebas (pertanian dan non-pertanian), serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

		Februari dan Agustus 2011						
	Februari	Agustus						
Juta	111,28	109,67						
Juta	34,51	37,77						
Juta	56,79	53,91						
Juta	3,59	3,72						
Juta	42,46	39,08						
Juta	10,73	11,12						
Juta	19,98	17,99						
Juta	73,17	68,18						
Juta	67,62	67,99						
Juta	22,22	24,38						
Juta	40,23	38,62						
Juta	2,92	3,00						
Juta	29,49	27,19						
Juta	7,83	8,44						
Juta	5,17	4,99						
Juta	42,48	40,61						
Juta	43,66	41,68						
Juta	12,29	13,39						
Juta	16,56	15,29						
Juta	0,68	0,72						
Juta	12,97	11,89						
Juta	2,91	2,68						
Juta	14,81	13,00						
Juta	30,69	27,57						
	Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta Juta	Juta 111,28 Juta 34,51 Juta 56,79 Juta 3,59 Juta 42,46 Juta 19,98 Juta 73,17 Juta 67,62 Juta 22,22 Juta 40,23 Juta 29,49 Juta 7,83 Juta 5,17 Juta 42,48 Juta 43,66 Juta 16,56 Juta 0,68 Juta 12,97 Juta 14,81						

Tabel 4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

rebruari dan Agustus 2011						
Indikator		Februari	Agustus			
Laki dan Perempuan	%	100,00	100,00			
a. Pekerja dengan upah/gaji						
(buruh/karyawan/pegawai)	%	31,01	34,44			
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	%	51,03	49,16			
i. Pengusaha	%	3,23	3,39			
ii. Berusaha sendiri	%	38,15	35,63			
iii. Pekerja bebas	%	9,65	10,14			
c. Pekerja keluarga	%	17,96	16,40			
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	%	65,76	62,17			
Laki-laki	%	100,00	100,00			
a. Pekerja dengan upah/gaji						
(buruh/karyawan/pegawai)	%	32,86	35,86			
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	%	59,49	56,81			
i. Pengusaha	%	4,31	4,41			
ii. Berusaha sendiri	%	43,61	39,99			
iii. Pekerja bebas	%	11,58	12,41			
c. Pekerja keluarga	%	7,64	7,33			
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	%	62,82	59,73			
Perempuan	%	100,00	100,00			
a. Pekerja dengan upah/gaji						
(buruh/karyawan/pegawai)	%	28,15	32,13			
b. Wiraswasta (i+ii+iii)	%	37,92	36,68			
i. Pengusaha	%	1,56	1,73			
ii. Berusaha sendiri	%	29,71	28,53			
iii. Pekerja bebas	%	6,66	6,43			
c. Pekerja keluarga	%	33,93	31,19			
d. Pekerja "rentan" (ii + iii + c)	%	70,29	66,15			



Grafik 5. Persentase Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011

Keterangan:

- 1. Pekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)
- 2. Pengusaha
- 3. Berusaha sendiri
- 4. Pekerja bebas
- 5. Pekerja keluarga

4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Informasi sektoral atau lapangan usaha biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa; dalam prosesnya, pekerja berpindah dari desa ke kota.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu A(griculture), M(anufacture) dan S(ervices), berdasarkan pada definisi sektor International Standard Industrial Classification (ISIC) System (Revision 2 and Revision 3).

Hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan bahwa di Indonesia, sektor pertanian mulai digeser oleh sektor jasa. Hal ini ditunjukkan secara sektoral oleh proporsi jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Jasa-Jasa sebesar 43,05 persen sedangkan Sektor Pertanian mencapai 38,17 persen dan Sektor Manufaktur sebesar 18,78 persen. Apabila diuraikan lebih lanjut, Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar tingginya persentase penduduk yang bekerja di Sektor Jasa-Jasa, selain ditunjang oleh Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Angkutan. Sedangkan persentase Sektor Industri dan Bangunan menjadi penyumbang terbesar Sektor Manufaktur dengan persentase masing-masing sebesar 12,31 dan 5,02.

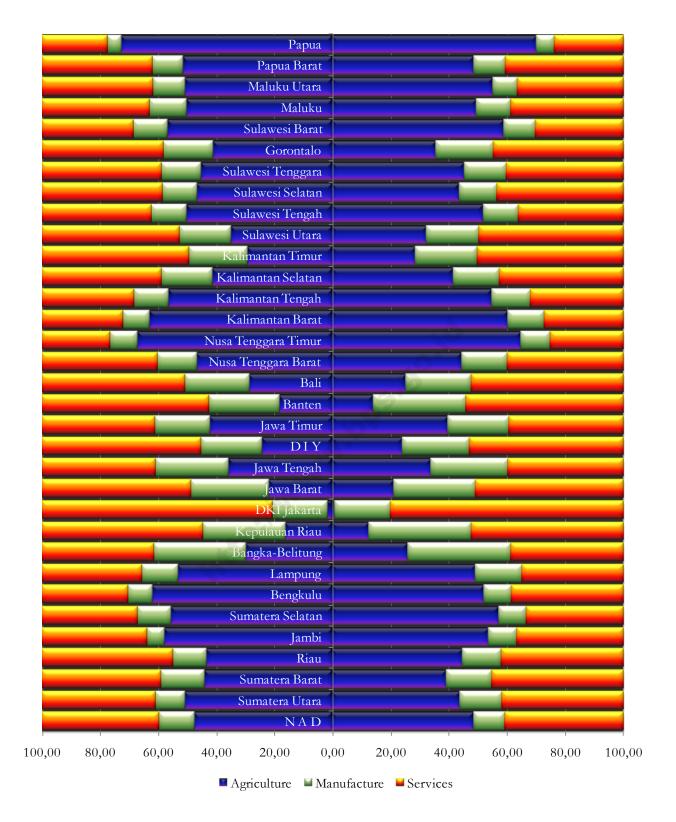
Komposisi sektoral hasil Sakernas Agustus 2011 ternyata tidak terjadi pergeseran berarti dibandingkan dengan Februari 2011. Meskipun *share* pertanian turun sekitar 3 persen poin, sektor ini masih menjadi sektor dominan kedua setelah jasa-jasa. Sektor jasa justru mengalami kenaikan tipis 0,40 persen dibandingkan dengan kondisi Februari 2011. Kenaikan ini terjadi karena faktor musiman, dimana pada Agustus tidak ada kegiatan panen raya, sehingga pekerja terutama pekerja informal pindah ke sektor-sektor jasa informal yang mudah untuk dimasuki. Sektor yang justru mengalami kenaikan yang relatif besar (2 persen poin) adalah sektor manufaktur, yaitu dari 18,78 persen pada Februari 2011 menjadi 20,60 persen pada Agustus 2011.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja (Total)	Juta	111,28	109,67
a. Pertanian	Juta	42,48	39,33
b. Manufaktur	Juta	20,90	22,59
i. Pertambangan	Juta	1,35	1,47
ii. Industri	Juta	13,70	14,54
iii. Listrik, gas dan air	Juta	0,26	0,24
iv. Bangunan	Juta	5,59	6,34
c. Jasa-jasa	Juta	47,91	47,75
i. Perdagangan	Juta	23,24	23,40
ii. Angkutan	Juta	5,59	5,08
iii. Keuangan	Juta	2,06	2,63
iv. Jasa kemasyarakatan	Juta	17,03	16,65
Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja (Laki-laki)	Juta	67,62	67,99
a. Pertanian	Juta	25,88	24,87
b. Manufaktur	Juta	14,86	16,14
i. Pertambangan	Juta	1,21	1,33
ii. Industri	Juta	7,97	8,45
iii. Listrik, gas dan air	Juta	0,23	0,21
iv. Bangunan	Juta	5,45	6,15
c. Jasa-jasa	Juta	26,88	26,98
i. Perdagangan	Juta	11,48	11,41
ii. Angkutan	Juta	5,14	4,78
iii. Keuangan	Juta	1,46	1,91
iv. Jasa kemasyarakatan	Juta	8,81	8,89
Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja (Perempuan)	Juta	43,66	41,68
a. Pertanian	Juta	16,59	14,46
b. Manufaktur	Juta	6,04	6,45
i. Pertambangan	Juta	0,14	0,13
ii. Industri	Juta	5,73	6,09
iii. Listrik, gas dan air	Juta	0,02	0,03
iv. Bangunan	Juta	0,14	0,19
c. Jasa-jasa	Juta	21,03	20,78
i. Perdagangan	Juta	11,76	11,99
ii. Angkutan	Juta	0,45	0,30
iii. Keuangan	Juta	0,60	0,72
iv. Jasa kemasyarakatan	Juta	8,21	7,76

Tabel 6. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Laki dan Perempuan	%	100,00	100,00
a. Pertanian	%	38,17	35,86
b. Manufaktu r	%	18,78	20,60
i. Pertambangan	%	1,22	1,34
ii. Industri	%	12,31	13,26
iii. Listrik, gas dan air	%	0,23	0,22
iv. Bangunan	%	5,02	5,78
c. Jasa-jasa	%	43,05	43,54
i. Perdagangan	%	20,88	21,33
ii. Angkutan	%	5,02	4,63
iii. Keuangan	%	1,85	2,40
iv. Jasa kemasyarakatan	%	15,30	15,18
Laki-laki	%	100,00	100,00
a. Pertanian	%	38,27	36,58
b. Manufaktur	%	21,98	23,73
i. Pertambangan	%	1 , 79	1,96
ii. Industri	%	11,78	12,43
iii. Listrik, gas dan air	%	0,34	0,30
iv. Bangunan	%	8, 07	9,04
c. Jasa-jasa	%	39,75	39,68
i. Perdagangan	%	16,97	16,78
іі. Angkutan	%	7,59	7,02
iii. Keuangan	%	2,15	2,81
iv. Jasa kemasyarakatan	%	13,03	13,07
Perempuan	%	100,00	100,00
a. Pertanian	%	38,01	34,68
b. Manufaktur	%	13,83	15,47
i. Pertambangan	%	0,33	0,32
ii. Industri	%	13,13	14,61
iii. Listrik, gas dan air	%	0,06	0,08
iv. Bangunan	%	0,31	0,46
c. Jasa-jasa	%	48,17	49,84
i. Perdagangan	%	26,94	28,77
ii. Angkutan	%	1,03	0,73
iii. Keuangan	%	1,38	1,73
iv. Jasa kemasyarakatan	%	18,82	18,61



Grafik 6. Persentase Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011

4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

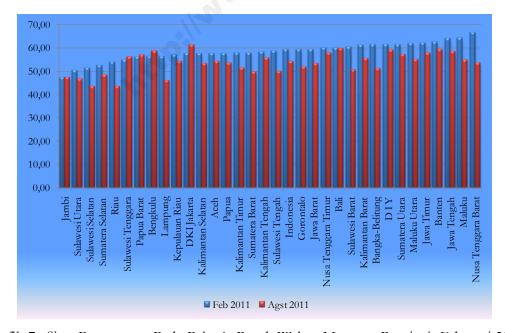
Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai proporsi dari total pekerja.

Pada Februari 2011 tingkat pekerja paruh waktu mencapai 16,59 persen yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 17 orang pekerja paruh waktu. Sementara *share* perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 59,28 persen yang berarti bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, 59 orang adalah perempuan. Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi daripada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, masing-masing sebesar 25,06 persen dan 11,12 persen.

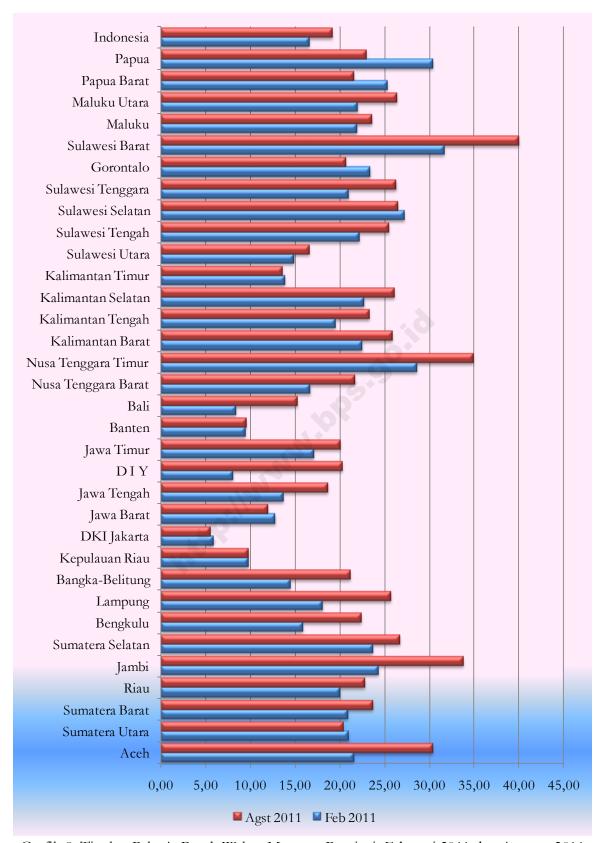
Pada Agustus 2011 tingkat pekerja paruh waktu justru meningkat hingga mencapai 19,21 persen. Artinya dari 100 orang yang bekerja, terdapat 19 orang yang bekerja paruh waktu. Peningkatan persentase pekerja paruh waktu ini terlihat seimbang baik untuk pekerja laki-laki (dari 11,12 persen pada Februari 2011 menjadi 14,19 persen pada Agustus 2011) dan pekerja perempuan (dari 25,06 persen pada Februari 2011 menjadi 27,40 persen pada Agustus 2011). Tetapi, jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, kenaikan persentase pekerja paruh waktu justru terjadi di daerah perdesaan (dari 22,25 persen pada Februari 2011 menjadi 27,54 persen pada Agustus 2011), sedangkan di daerah perkotaan, justru terjadi penurunan, meskipun tidak berarti (dari 10,29 persen pada Februari 2011 menjadi 10,19 persen pada Agustus 2011). Fenomena yang terjadi pada pekerja paruh waktu perempuan adalah menurunnya share perempuan pada pekerja paruh waktu, yaitu dari 59 per 100 perempuan bekerja pada Februari 2011 menjadi 54 orang per 100 perempuan bekerja pada Agustus 2011. Tetapi, penurunan ini juga mungkin disebabkan oleh menurunnya tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja, bukan semata-mata lebih panjangnya jam kerja perempuan.

Tabel 7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Jumlah Penduduk 15+ yang Bekerja (Total)	Juta	111,28	109,67
a. Laki-laki	Juta	67,62	67,99
b. Perempuan	Juta	43,66	41,68
c. Perkotaan	Juta	52,71	52,68
d. Perdesaan	Juta	58,57	56,99
Jumlah Pekerja Paruh Waktu	Juta	18,46	21,06
a. Laki-laki	Juta	7,52	9,65
b. Perempuan	Juta	10,94	11,42
c. Perkotaan	Juta	5,42	5,37
d. Perdesaan	Juta	13,03	15,69
Tingkat Pekerja Paruh Waktu	%	16,59	19,21
a. Laki-laki	%	11,12	14,19
b. Perempuan	%	25,06	27,40
c. Perkotaan	%	10,29	10,19
d. Perdesaan	%	22,25	27,54
Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu	%	59,28	54,21



Grafik 7. *Shan* Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2011 dan Agustus 2011

4.5. KILM 6. JAM KERJA

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja perminggu, antara 25 dan 34 jam, antara 35 dan 39 jam, antara 40 dan 48 jam, antara 49 dan 59 jam, 40 jam ke atas, 50 jam ke atas, dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

Hasil Sakernas Februari 2011 menunjukkan sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam perminggu dengan persentase sebesar 67,26, sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam kerja perminggu mencapai 32,74 persen. Sedangkan untuk Sakernas Agustus 2011 terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja di bawah 35 jam menjadi 33,94 persen.

Sakernas Februari dan Agustus juga menunjukkan bahwa pekerja perempuan yang bekerja di bawah 35 jam perminggu lebih mendominasi dibanding pekerja laki-laki dan terlihat pada hampir setiap pengelompokan jumlah jam kerja 35 jam per minggu ke bawah.

Berbeda dengan komposisi jam kerja berdasarkan jenis kelamin, komposisi pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam perminggu) berdasarkan klasifikasi Desa-Kota terlihat agak berbeda. Di daerah perkotaan, proporsi pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu ternyata mengalami penurunan dari 23,65 persen pada Februari 2011 menjadi 21,76 persen pada Agustus 2011. Kenaikan justru terjadi pada daerah perdesaan dari 40,91 persen pada Februari 2011 menjadi 45,20 persen pada Agustus 2011.

Secara keseluruhan persentase pekerja berdasarkan jam kerja tertinggi pada kelompok jam kerja 40-48 jam per-minggu. Pada Februari 2011 persentase pekerja yang bekerja selama 40-48 jam seminggu adalah 27,55 persen dan meningkat menjadi 28,85 persen pada Agustus 2011. Hal ini diikuti dengan menurunnya persentase pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal (lebih dari 60 jam seminggu), yang pada Februari 2011 sebesar 13,76 persen dan menurun menjadi 12,00 persen pada Agustus 2011. Kenaikan tipis justru terjadi pada pekerja yang sementara tidak bekerja (0 jam seminggu) yakni 2,01 persen pada Februari 2011 dan 2,40 persen pada Agustus 2011.

Tabel 8. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011

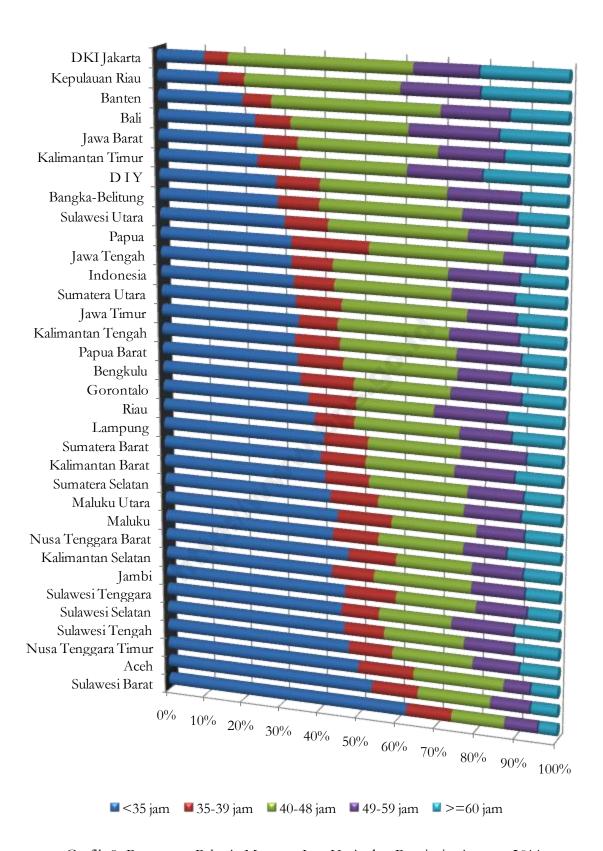
Indikator		Februari	Agustus
Total	%	100,00	100,00
a. 0 jam [*]	%	2,01	2,40
b. 1 - 14 jam	%	5,54	6,05
c. 15 - 24 jam	%	11,35	11,75
d. 25 - 34 jam	%	13,84	13,74
e. 35 - 39 jam	%	10,41	10,14
f. 40 - 48 jam	%	27,55	28,85
g. 49 - 59 jam	%	15,54	15,07
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	13,76	12,00
Laki-Laki	%	100,00	100,00
a. 0 jam*	%	2,15	2,30
b. 1 - 14 jam	%	3,50	3,74
c. 15 - 24 jam	%	8,24	9,09
d. 25 - 34 jam	%	12,40	12,63
e. 35 - 39 jam	%	9,76	9,75
f. 40 - 48 jam	%	30,94	32,41
g. 49 - 59 jam	%	18,69	17,62
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	14,32	12,47
Perempuan	%	100,00	100,00
a. 0 jam*	%	1,79	2,57
b. 1 - 14 jam	%	8,71	9,82
c. 15 - 24 jam	%	16,16	16,09
d. 25 - 34 jam	%	16,06	15,55
e. 35 - 39 jam	%	11,42	10,77
f. 40 - 48 jam	%	22,32	23,05
g. 49 - 59 jam	%	10,66	10,91
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	12,88	11,24

^{*0} jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011 (Lanjutan)

Indikator		Februari	Agustus
Total	%	100,00	100,00
a. 0 jam [*]	%	2,01	2,40
b. 1 - 14 jam	%	5,54	6,05
c. 15 - 24 jam	%	11,35	11,75
d. 25 - 34 jam	%	13,84	13,74
e. 35 - 39 jam	%	10,41	10,14
f. 40 - 48 jam	%	27,55	28,85
g. 49 - 59 jam	%	15,54	15,07
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	13,76	12,00
Perkotaan	%	100,00	100,00
a. 0 jam [*]	%	2,12	2,16
b. 1 - 14 jam	%	4,00	3,66
c. 15 - 24 jam	%	7,38	6,94
d. 25 - 34 jam	%	10,15	9,02
e. 35 - 39 jam	%	9,13	8,72
f. 40 - 48 jam	%	32, 50	36,43
g. 49 - 59 jam	%	16,48	16,83
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	18,24	16,25
Perdesaan	%	100,00	100,00
a. 0 jam*	0/0	1,91	2,63
b. 1 - 14 jam	%	6,93	8,26
c. 15 - 24 jam	%	14,92	16,20
d. 25 - 34 jam	%	17,15	18,10
e. 35 - 39 jam	%	11,56	11,44
f. 40 - 48 jam	%	23,11	21,85
g. 49 - 59 jam	%	14, 70	13,44
h. Lebih dari/sama dengan 60 jam	%	9,72	8,07

^{*0} jam: Sementara tidak bekerja



Grafik 9. Persentase Pekerja Menurut Jam Kerja dan Provinsi, Agustus 2011

4.6. KILM 7. PEKERJA SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumahtangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang, selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu mereka utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Pada Sakernas Februari 2011 jumlah laki-laki yang bekerja di sektor informal lebih banyak dibanding perempuan yaitu 37,8 juta orang laki-laki dan 27,1 juta orang perempuan. Pada Agustus 2011 jumlah pekerja di sektor informal yang berjenis kelamin laki-laki secara absolut turun menjadi 35,82 juta dan perempuan sebesar 24,13 juta. Penurunan ini terjadi karena secara absolut jumlah pekerja turun. Tetapi, secara proposi, memang terjadi kenaikan persentase pekerja formal yang tentunya diikuti dengan penurunan pekerja informal. Persentase pekerja sektor informal pada Februari 2011 adalah 58,37 persen, sedangkan pada Agustus 2011 menurun menjadi 54,66 persen. Sektor formal pada Februari 2011 mencapai 41,63 persen dan meningkat sekitar 4 persen poin pada Agustus 2011 menjadi 45,34 persen.

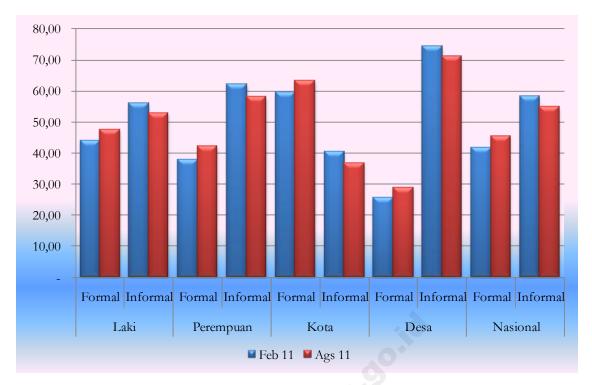
Dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum pria, dimana sekitar 2/3 dari kue pekerjaan di sektor formal dipegang oleh laki-laki. Pada Februari 2011 persentase laki-laki yang bekerja di sektor formal adalah 64,28 persen dan relatif tetap pada angka tersebut dengan kenaikan sangat tipis yang mencapai 64,70 persen pada Agustus 2011.

Ciri khas sektor formal yaitu sektor yang sebagian besar terdapat di daerah perkotaan terbukti dengan tingginya persentase pekerja formal di perkotaan. Angka Sakernas Februari 2011 menunjukkan terdapat 68 dari 100 pekerja yang bekerja di perkotaan merupakan pekerja sektor formal, sedangkan pada Agustus 2011, jumlah ini menurun tipis menjadi 67 orang dari 100 orang pekerja di perkotaan bekerja di sektor formal. Kondisi sebaliknya dapat kita temui di

perdesaan, dimana pada Februari maupun Agustus 2011, persentase pekerja perdesaan yang bekerja di sektor informal mencapai 67 persen.

Tabel 9. Pekerja Menurut Kategori Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Total	Juta	111,28	109,67
a. Laki	Juta	67,62	67,99
b. Perempuan	Juta	43,66	41,68
c. Perkotaan	Juta	52,71	52,68
d. Perdesaan	Juta	58,57	56,99
Formal	Juta	46,32	49,73
a. Laki	Juta	29,78	32,17
b. Perempuan	Juta	16,55	17,55
c. Perkotaan	Juta	31,32	33,36
d. Perdesaan	Juta	15,00	16,36
Informal	Juta	64,96	59,94
a. Laki	Juta	37,85	35,82
b. Perempuan	Juta	27,11	24,13
c. Perkotaan	Juta	21,39	19,32
d. Perdesaan	Juta	43,57	40,63
Total Formal+Informal	%	100,00	100,00
a. Formal	%	41,63	45,34
b. Informal	%	58,37	54,66
Formal	%	100,00	100,00
a. Laki	%	64,28	64,70
b. Perempuan	%	35,72	35,30
c. Perkotaan	%	67,62	67,09
d. Perdesaan	%	32,38	32,91
Informal	%	100,00	100,00
a. Laki	%	58,26	59,75
b. Perempuan	%	41,74	40,25
c. Perkotaan	%	32,92	32,23
d. Perdesaan	%	67,08	67,77



Grafik 10. Persentase Pekerja Menurut Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011



Grafik 11. Persentase Pekerja Menurut Sektor (Formal/Informal) dan Provinsi, Agustus 2011

5. Indikator Pengangguran

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Konsep ini harus dilihat secara hati-hati dan tidak bisa digunakan sebagai pengukuran kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara TPT dengan kesulitan ekonomi (baca:kemiskinan) seringkali ada.

Bersama dengan rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan (excess supply). Jika bekerja diambil sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, beberapa pengangguran jangka pendek dapat diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu, ditentukan oleh usia, jenis kelamin, pekerjaan atau lapangan usaha, juga berguna dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Tingkat pengangguran dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tetapi, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tapi tersedia dan secara aktif mencari pekerjaan.

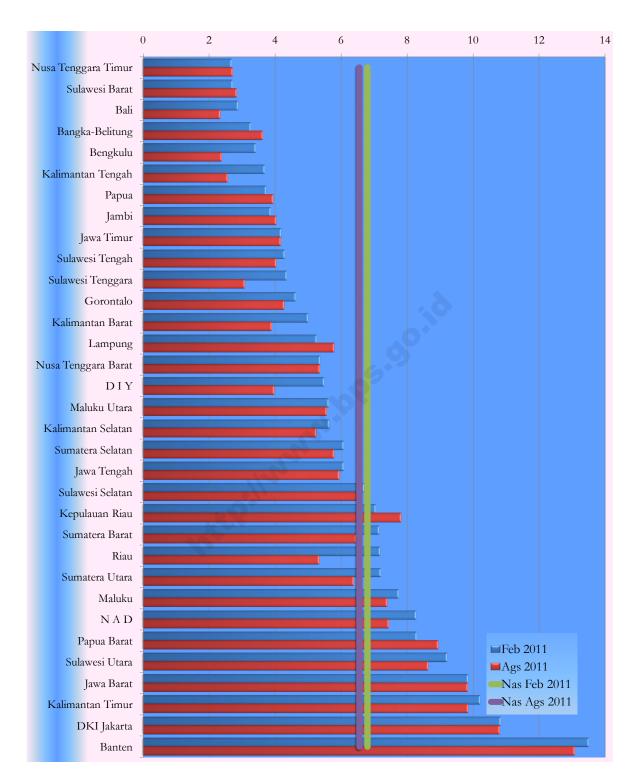
Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi pekerja menganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang dihasilkan dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok tertentu pekerja) oleh tenaga kerja yang sesuai, yang merupakan jumlah total orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam kelompok. Harus ditekankan bahwa pembagi sebagai dasar statistik ini merupakan tenaga kerja atau bagian penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian.

Secara konsisten dan perlahan, TPT di Indonesia mengalami penurunan dari yang semula 6,80 pada Februari 2011 menjadi 6,56 pada Agustus 2011. Berdasarkan jenis kelamin, TPT lakilaki turun dari 6,42 persen pada Februari 2011 menjadi 5,90 persen pada Agustus 2011, sedangkan TPT perempuan justru meningkat tipis dari 7,38 persen pada Februari 2011 menjadi 7,62 persen pada Agustus 2011. Penurunan TPT Februari-Agustus berdasarkan klasifikasi daerah terjadi di daerah perkotaan, dimana TPT turun dari 9,02 persen pada Februari 2011 menjadi 8,23 persen pada Agustus 2011. Sedangkan di daerah perdesaan justru terjadi kenaikan TPT dari 4,70 persen pada Februari 2011 menjadi 4,96 persen pada Agustus 2011.

Tabel 10. Indikator Pengangguran di Indonesia, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Angkatan Kerja	Juta	119,40	117,37
a. Laki	Juta	72,26	72,25
b. Perempuan	Juta	47,14	45,12
c. Perkotaan	Juta	57,94	57,41
d. Perdesaan	Juta	61,46	59,96
Jumlah Pengangguran	Juta	8,12	7,70
a. Laki	Juta	4,64	4,26
b. Perempuan	Juta	3,48	3,44
c. Perkotaan	Juta	5,23	4,73
d. Perdesaan	Juta	2,89	2,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,80	6,56
a. Laki	%	6,42	5,90
b. Perempuan	%	7,38	7,62
c. Perkotaan	%	9,02	8,23
d. Perdesaan	%	4, 70	4,96



Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Februari dan Agustus 2011

5.2. KILM 9. Pengangguran Pada Kelompok Usia Muda

Penganggur pada kelompok usia muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara, yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "usia muda" mencakup orang yang berusia 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berusia 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda.
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa.
- 3) Share pengangguran kaum muda terhadap total; dan
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Pada Februari 2011, TPT usia muda adalah sebesar 23,92 persen sedangkan pada Agustus 2011 TPT usia muda menurun menjadi 19,99 persen. Penurunan terjadi di semua klasifikasi, baik klasifikasi berdasarkan jenis kelamin, maupun klasifikasi berdasarkan daerah tempat tinggal (desa-kota). TPT usia muda penduduk berjenis kelamin laki-laki pada Februari 2011 adalah 23,01 persen dan turun menjadi 19,27 persen, sedangkan TPT usia muda perempuan turun dari 25,28 persen pada Februari 2011 menjadi 21,04 persen pada Agustus 2011. Dilihat berdasarkan klasifikasi kota-desa, di daerah perkotaan terjadi penurunan TPT usia muda dari 29,30 persen pada Februari 2011 menjadi 23,12 persen pada Agustus 2011, sedangkan di perdesaan TPT usia muda turun dari 18,31 persen pada Februari 2011 menjadi 16,94 persen pada Agustus 2011.

Seiring menurunnya TPT usia muda, rasio TPT usia muda terhadap TPT penduduk dewasa juga menurun rata-rata 1,93 persen poin. Angka nasional pada Februari 2011 menunjukkan rasio TPT usia muda terhadap TPT penduduk dewasa adalah 7,40 sedangkan pada Agustus 2011 rasio ini turun menjadi 5,47 kali. Penurunan rasio terbesar terjadi pada penduduk perempuan, dimana terjadi penurunan sebesar 2,42 poin, yaitu 7,06 pada Februari 2011 menjadi 4,65 pada Agustus 2011. Untuk penduduk muda laki-laki, terjadi penurunan rasio dari 7,65 pada Februari 2011 menjadi 6,18 pada Agustus 2011.

Penurunan jumlah penganggur usia muda secara absolut mengakibatkan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penganggur dan turunnya *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda. Pada Februari 2011 *share* penganggur usia muda terhadap

total penganggur adalah 60,64 persen dan turun sebesar 6,41 persen poin pada Agustus 2011 menjadi 54,23 persen. Artinya, pada Agustus 2011, dari 100 penganggur, terdapat 54 orang diantaranya berusia antara 15 sampai 24 tahun.

Pada Februari 2011 *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda adalah 12,03 persen dan pada Agustus 2011 *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda adalah 10,07 persen. Komposisi ini konsisten antara kondisi Februari 2011 dengan Agustus 2011.

Tabel 11. Indikator Pengangguran Usia Muda di Indonesia, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
TPT Penduduk Usia Muda	%	23,92	19,99
a. Laki	%	23,01	19,27
b. Perempuan	%	25,28	21,04
c. Perkotaan	%	29,30	23,12
d. Perdesaan	%	18,31	16,94
Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa	%	7,40	5,47
a. Laki	%	7,65	6,18
b. Perempuan	%	7,06	4,65
c. Perkotaan	%	6,47	4,64
d. Perdesaan	%	9,00	7,11
Share Penganggur Usia Muda terhadap Total			
Penganggur	%	60,64	54,23
a. Laki	%	61,09	56,25
b. Perempuan	%	60,03	51,72
c. Perkotaan	%	58,89	50,33
d. Perdesaan	%	63,80	60,42
Share Penganggur Usia Muda terhadap Total			
Penduduk Usia Muda	%	12,03	10,07
a. Laki	%	13,76	11,50
b. Perempuan	%	10,27	8,63
c. Perkotaan	%	14,35	11,48
d. Perdesaan	%	9,47	8,66

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan pekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan pekerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi pekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (low skilled job) di dalam negeri. Cara lainnya, shan pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Tabel 12. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
TPT Nasional	%	6,80	6,56
Tidak Pernah Sekolah	%	1,74	3,19
a. Laki	%	1,69	2,74
b. Perempuan	%	1,78	3,56
c. Perkotaan	%	2,81	5,93
d. Perdesaan	%	1,48	2,36
Sekolah Dasar	%	4,86	5,08
a. Laki	%	4,85	4,73
b. Perempuan	%	4,88	5,66
c. Perkotaan	%	6,64	6,77
d. Perdesaan	%	3,74	3,97
Sekolah Menengah	%	11,37	10,59
a. Laki	%	9,93	9,00
b. Perempuan	%	14,29	13,79
c. Perkotaan	%	11,82	10,80
d. Perdesaan	%	10,35	10,12
Sekolah Tinggi	%	10,57	7,71
a. Laki	%	8,80	6,13
b. Perempuan	%	12,54	9,41
c. Perkotaan	%	11,36	7,40
d. Perdesaan	%	7,89	8,62

Dari tabel di atas dapat dilihat TPT berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, secara nasional TPT turun dari 6,80 persen pada Februari 2011 menjadi 6,56 persen pada Agustus 2011. TPT terbesar berdasarkan tingkat pendidikan dapat ditemui pada tingkat pendikan sekolah menengah dimana pada Februari 2011 TPT pada tingkat pendidikan ini adalah 11,37 persen, sedangkan pada Agustus 2011 turun menjadi 10,59 persen.

Penurunan TPT tertinggi terjadi pada tingkat pendidikan tinggi yaitu terjadi penurunan sebesar 2,86 persen poin (10,57 persen pada Februari 2011 dan 7,71 persen pada Agustus 2011). Selain itu, penurunan TPT pada kelompok pendidikan ini terlihat pada penduduk perempuan dengan penurunan sebesar 3,14 persen poin, sedangkan pada laki-laki turun sebesar 2,67 persen poin. Pola berbeda terlihat pada klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan, dimana di daerah perkotaan terjadi penurunan TPT pada kelompok pendidikan tinggi ini (11,36 persen pada Februari 2011 menjadi 7,40 persen pada Agustus 2011), sedangkan di daerah perdesaan justru terjadi kenaikan tipis sebesar 0,73 persen poin (7,89 persen pada Februari 2011 menjadi 8,62 persen pada Agustus 2011).

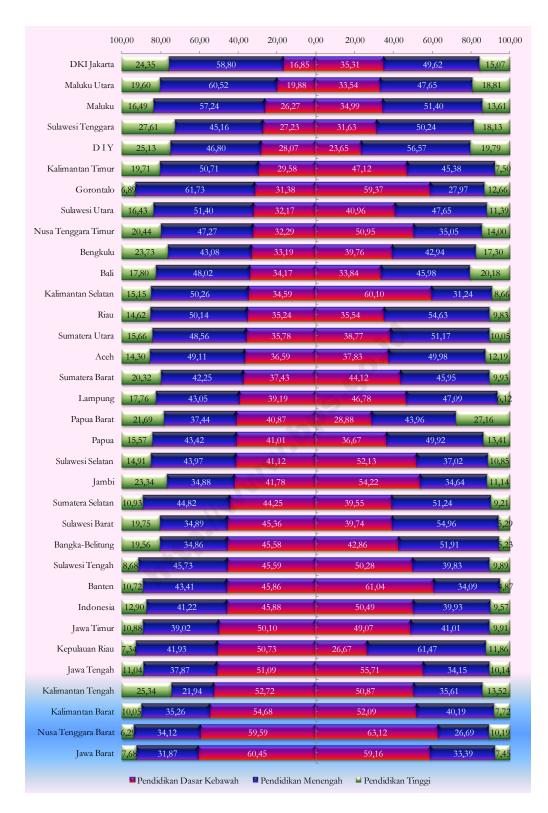
Kenaikan TPT terbesar secara keseluruhan ternyata terjadi pada kelompok penduduk yang tidak pernah sekolah yang tinggal di daerah perkotaan. Kenaikan relatif besar (3,13 persen poin) terjadi pada periode Februari-Agustus 2011. Pada Februari 2011 TPT pada kelompok ini adalah 2,81 persen, sedangkan pada Agustus 2011 meningkat menjadi 5,93 persen.

Melihat komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap, berdasarkan tingkat keahlian mereka. Data Sakernas Februari dan Agustus menunjukkan bahwa penganggur terbanyak adalah penganggur dengan pendidikan Sekolah Dasar. Pada Februari 2011, persentase penganggur dengan pendidikan Sekolah Dasar adalah 44,74 persen dan meningkat sebanyak 3,28 persen poin menjadi 48,02 persen pada Agustus 2011. Penurunan terbesar komposisi penganggur berdasarkan pendidikan terjadi pada mereka yang berpendidikan tinggi. Pada periode Februari-Agustus 2011 terjadi penurunan sebesar 3,33 persen poin, yaitu 12,90 persen pada Februari 2011 menjadi 9,57 persen pada Agustus 2011. Selain pendidikan tinggi, komposisi penganggur yang berpendidikan menengah (SMA sederajat) juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,29 persen poin (41,22 persen pada Februari 2011 menjadi 39,93 persen pada Agustus 2011).

Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, terlihat adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terutama pada tingkat pendidikan tinggi. Persentase perempuan menanggur dengan tingkat pendidikan tinggi adalah 16,89 persen pada Februari 2011 turun menjadi 12,62 persen pada Agustus 2011. Sedangkan persentase penganggur laki-laki yang berpendidikan tinggi pada Februari 2011 adalah 9,90 persen dan turun hingga 7,11 persen pada Agustus 2011. Persentase yang menunjukkan perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki justru terlihat pada pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

Tabel 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus
Nasional	%	100,00	100,00
Tidak Pernah Sekolah	%	1,14	2,47
a. Laki	%	0,84	1,72
b. Perempuan	%	1,52	3,40
c. Perkotaan	%	0,56	1,74
d. Perdesaan	%	2,17	3,63
Sekolah Dasar	%	44,74	48,02
a. Laki	%	47,06	50,16
b. Perempuan	%	41,65	45,37
c. Perkotaan	%	36,61	41,31
d. Perdesaan	%	59,44	58,70
Sekolah Menengah	%	41,22	<i>39,93</i>
a. Laki	%	42,19	41,01
b. Perempuan	%	39,94	38,61
c. Perkotaan	%	46,19	45,72
d. Perdesaan	%	32,24	30,74
Sekolah Tinggi	%	12,90	<i>9,57</i>
a. Laki	%	9,90	7,11
b. Perempuan	%	16,89	12,62
c. Perkotaan	%	16,64	11,23
d. Perdesaan	%	6,14	6,93



Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari dan Agustus 2011

5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu) dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan untuk menambah jumlah jam kerjanya.

Pada Februari 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia adalah 15,74 juta jiwa, dimana 8,81 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Sedangkan pada Agustus 2011 jumlah setengah penganggur di Indonesia turun 2,21 juta jiwa menjadi 13,52 juta, terdiri dari 7,66 juta laki-laki dan 5,86 juta perempuan yang tersebar di perkotaan sebesar 4,96 juta jiwa dan perdesaan sebesar 8,56 juta jiwa.

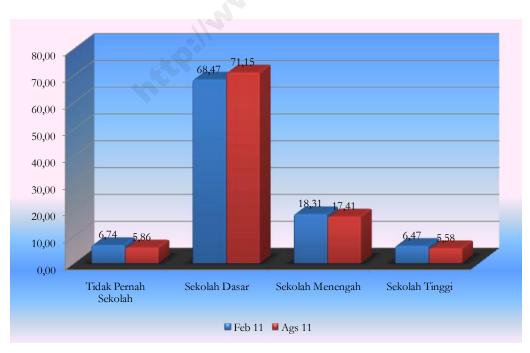
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2011 ratarata menurun sebesar 1,64 persen poin dibandingkan dengan kondisi Februari 2011. Tingkat setengah penganggur pada Februari 2011 adalah 13,88 persen, sedangkan pada Agustus 2011 menurun 1,66 persen poin menjadi 11,52 persen. Pada Februari 2011 dari 100 orang penduduk laki-laki yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 12 orang setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2011 turun menjadi 11 orang setangah penganggur per 100 angkatan kerja.

Penurunan proporsi setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja juga terjadi pada periode Februari-Agustus 2011. Pada Februari 2011, dari 100 orang penduduk yang bekerja 14 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada Agustus 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 12 orang setengah penganggur per 100 penduduk bekerja. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, penurunan setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terlihat proporsional antara penduduk laki-laki dan perempuan, demikian juga jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah perkotaan-perdesaan.

Menilik komposisi setengah penganggur berdasarkan tingkat pendidikan, hampir di setiap tingkat pendidikan terjadi penurunan persentase setengah penganggur, kecuali pada tingkat pendidikan dasar terjadi kenaikan dari Februari ke Agustus 2011 sebesar 2,68 persen poin (68,47 persen pada Februari 2011 dan 71,15 persen pada Agustus 2011)

Tabel 14. Indikator Setengah Penganggur, Februari dan Agustus 2011

Indikator	Februari	Agustus	
Total Setengah Penganggur	Juta	15,74	13,52
a. Laki	Juta	8,81	7,66
b. Perempuan	Juta	6,93	5,86
c. Perkotaan	Juta	5,92	4,96
d. Perdesaan	Juta	9,81	8,56
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	%	13,18	11,52
a. Laki	%	12,19	10,60
b. Perempuan	%	14,69	12,99
c. Perkotaan	%	10,22	8,64
d. Perdesaan	%	15,97	14,28
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	%	14,14	12,33
a. Laki	%	13,03	11,27
b. Perempuan	%	15,86	14,07
c. Perkotaan	%	11,24	9,42
d. Perdesaan	%	16,75	15,03



Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

Tabel 15. Persentase Setengah Penganggur Menurut Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

Indikator		Februari	Agustus	
Tidak Pernah Sekolah	%	6,74	5,86	
a. Laki	%	4,83	3,79	
b. Perempuan	%	9,17	8,56	
c. Perkotaan	%	3,85	4,36	
d. Perdesaan	%	8,48	6,72	
Sekolah Dasar	%	68,47	71,15	
a. Laki	%	69,56	72,83	
b. Perempuan	%	67,09	68,96	
c. Perkotaan	%	58,35	61,97	
d. Perdesaan	%	74,59	76,47	
Sekolah Menengah	%	18,31	17,41	
a. Laki	%	20,18	19,03	
b. Perempuan	%	15,94	15,29	
c. Perkotaan	%	26,28	23,43	
d. Perdesaan	%	13,51	13,93	
Sekolah Tinggi	%	6,47	5,58	
a. Laki	%	5,43	4,35	
b. Perempuan	%	7,80	7,19	
c. Perkotaan	%	11,53	10,24	
d. Perdesaan	%	3,42	2,88	

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat ketidakaktifan merupakan proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan, tingkat ketidakaktifan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen.

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan yang tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang buruk, misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita usia 25–34 tahun mungkin disebabkan karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti

melahirkan anak dan pengasuhan anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna data dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan.

Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja. Misalnya, perempuan kepala rumah tangga cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Di antara pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Namun, rendahnya tingkat ketidakaktifan wanita biasanya diikuti dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri pencari nafkah utama.

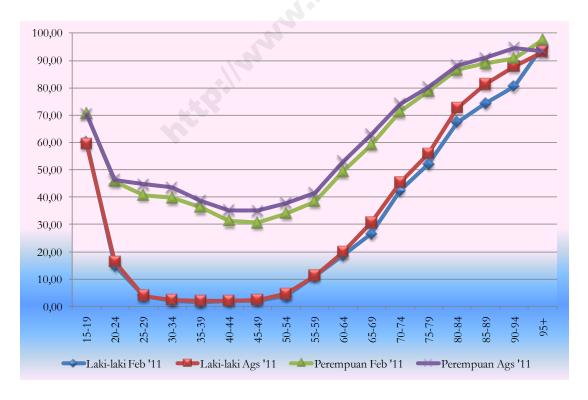
Fenomena meningkatnya tingkat ketidakaktifan pada periode Februari-Agustus 2011 sebenarnya menggambarkan adanya perpindahan dari kelompok angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Secara absolut jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong ke dalam bukan angkatan kerja meningkat sekitar 3 juta jiwa dari 51,36 juta jiwa pada Februari 2011 menjadi 54,39 juta jiwa pada Agustus 2011. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, sumbangan peningkatan bukan angkatan kerja ini 82 persen diantaranya adalah perempuan (2,57 juta) dan 18 persen laki-laki (0,56 juta). Kenaikan BAK berdasarkan klasifikasi kota-desa, 68 persen merupakan pertambahan BAK di perkotaan (2,12 juta) dan sisanya (32 persen) merupakan pertambahan BAK di perkotaan (1,01 juta).

Sejalan dengan peningkatan BAK baik menurut jenis kelamin maupun klasifikasi daerah, terjadi juga kenaikan pada tingkat ketidakaktifan. Pada Februari 2011 tingkat ketidakaktidan adalah 30,04persen meningkat sebesar 1,63 persen poin menjadi 31,66 persen pada Agustus 2011. Kenaikan 2,70 persen poin terjadi pada tingkat ketidakaktifan perempuan yaitu dari 45 per seratus penduduk pada Februari 2011 menjadi 48 per seratus penduduk pada Agustus 2011. Demikian juga dengan tingkat ketidakaktifan di daerah perdesaan yang mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen poin, dari 27,65 persen pada Februari 2011 menjadi 29,93 persen pada Agustus 2011.

Pola tingkat ketidakaktifan yang membentuk huruf "J" mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk usia muda, lalu turun pada usia produktif dan kembali meningkat pada usia-usia tua.

Tabel 16. Indikator Ketidakaktifan, Februari dan Agustus 2011

Indikator	Februari	Agustus	
Penduduk 15 tahun ke atas	Juta	170,66	171,76
a. Laki	Juta	85,16	85,71
b. Perempuan	Juta	85,50	86,05
c. Perkotaan	Juta	85,70	86,18
d. Perdesaan	Juta	84,95	85, 57
Bukan Angkatan Kerja (BAK)	Juta	51,26	54,39
a. Laki	Juta	12,90	13,46
b. Perempuan	Juta	38,36	40,93
c. Perkotaan	Juta	27,76	28,77
d. Perdesaan	Juta	23,49	25,61
Tingkat ketidakaktifan	%	30,04	31,66
a. Laki	%	15,14	15,70
b. Perempuan	%	44, 87	47,56
c. Perkotaan	%	32,4 0	33,39
d. Perdesaan	%	27,65	29,93



Grafik 15. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

6. Indikator Pendidikan Dan Melek Huruf

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini, secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Sayangnya, SAKERNAS tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca tulis (melek huruf) pekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Secara nasional, angka Sakernas Agustus 2011 tidak menunjukkan perubahan komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan. Komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara Februari dan Agustus relatif tidak mengalami perubahan berarti. Bahkan, terjadi kenaikan tipis pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah (4,43 persen pada Februari 2011 menjadi 5,08 persen pada Agustus 2011).

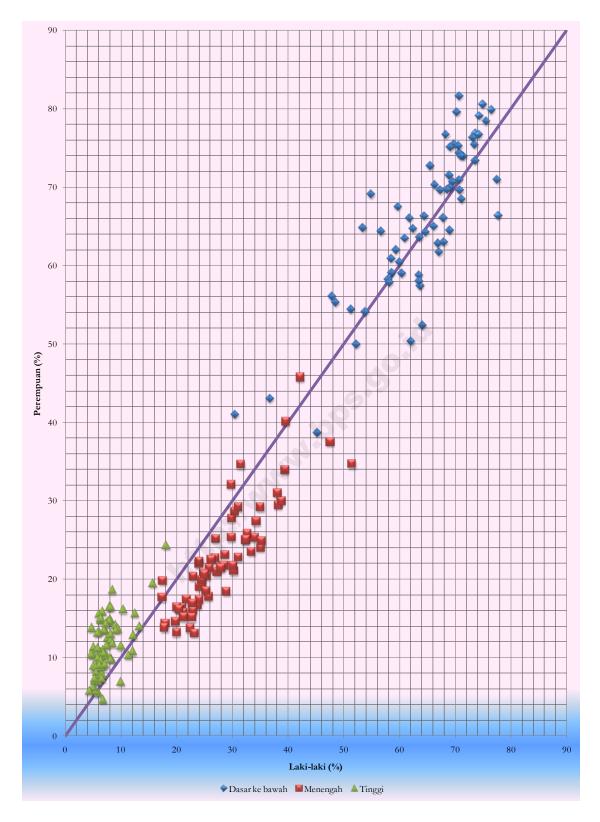
Komposisi angkatan kerja yang menamatkan pendidikan tingkat dasar pada Februari 2011 adalah 62,22 persen, sedangkan pada Agustus 2011 adalah 62,02 persen. Komposisi untuk tingkat pendidikan dasar ini berdasarkan jenis kelamin terlihat agak berbeda antara Februari dengan Agustus. Pada Februari 2011 persentase angkatan kerja laki-laki yang menamatkan pendidikan dasar lebih rendah dibandingkan dengan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama. Tetapi, pada Agustus 2011 polanya justru terbalik, dimana persentase laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan persentase angkatan kerja perempuan yang menamatkan pendidikan dasar. Hal ini diduga disebabkan karena terjadinya perpindahan perempuan dari angkatan kerja menjadi kelompok bukan angkatan kerja.

Tabel 17. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

1 estaun	dan Mgustus	2011	
Indikator		Februari	Agustus
Tidak Pernah Sekolah	9/0	4,43	5,08
a. Laki	%	3,19	3,70
b. Perempuan	%	6,33	7,29
c. Perkotaan	%	1,80	2,42
d. Perdesaan	%	6,92	7,63
Sekolah Dasar	%	62,62	62,02
a. Laki	%	62,32	62,57
b. Perempuan	%	63,08	61,15
c. Perkotaan	%	49,73	50,23
d. Perdesaan	%	74,77	73,32
Sekolah Menengah	%	24,65	24,75
a. Laki	%	27,26	26,88
b. Perempuan	%	20,64	21,34
c. Perkotaan	%	35,25	34,86
d. Perdesaan	%	14,65	15,07
Sekolah Tinggi	%	8,30	8,15
a. Laki	%	7,22	6,85
b. Perempuan	%	9,94	10,22
c. Perkotaan	%	13,22	12,49
d. Perdesaan	%	3,66	3,99



Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari dan Agustus 2011



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Ribu Jiwa)

Dunaninai		Februari		Agustus			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Aceh	1 534,30	1 570,47	3 104,77	1 550,20	1 587,33	3 137,53	
Sumatera Utara	4 292,22	4 430,85	8 723,07	4 309,88	4 449,44	8 759,32	
Sumatera Barat	1 620,19	1 706,54	3 326,73	1 628,87	1 715,49	3 344,36	
Riau	1 955,65	1 838,92	3 794,57	1 988,10	1 869,04	3 857,15	
Jambi	1 115,04	1 069,89	2 184,93	1 127,54	1 081,96	2 209,50	
Sumatera Selatan	2 665,50	2 593,03	5 258,52	2 686,17	2 613,79	5 299,96	
Bengkulu	613,73	589,91	1 203,64	618,28	593,85	1 212,12	
Lampung	2 784,55	2 623,97	5 408,51	2 798,66	2 636,97	5 435,63	
Bangka-Belitung	459,93	421,47	881,40	466,41	427,48	893,89	
Kepulauan Riau	629,28	598,54	1 227,83	644,22	612,48	1 256,70	
DKI Jakarta	3 722,93	3 650,48	7 373,41	3 744,55	3 671,14	7 415,69	
Jawa Barat	15 623,67	15 205,28	30 828,95	15 752,73	15 331,43	31 084,15	
Jawa Tengah	11 725,78	12 163,14	23 888,92	11 734,31	12 171,02	23 905,33	
DIY	1 325,48	1 387,75	2 713,22	1 330,48	1 393,15	2 723,63	
Jawa Timur	13 828,61	14 539,58	28 368,19	13 863,38	14 576,77	28 440,15	
Banten	3 870,14	3 721,14	7 591,28	3 918,79	3 767,57	7 686,36	
Bali	1 460,98	1 463,78	2 924,76	1 474,86	1 477,68	2 952,55	
Nusa Tenggara Barat	1 474,87	1 645,06	3 119,94	1 481,84	1 653,12	3 134,96	
Nusa Tenggara Timur	1 447,49	1 528,58	2 976,07	1 460,95	1 542,57	3 003,52	
Kalimantan Barat	1 536,48	1 474,03	3 010,51	1 541,83	1 479,00	3 020,83	
Kalimantan Tengah	810,82	734,44	1 545,25	816,50	740,15	1 556,65	
Kalimantan Selatan	1 308,27	1 295,82	2 604,09	1 320,19	1 306,54	2 626,73	
Kalimantan Timur	1 345,39	1 186,28	2 531,67	1 368,76	1 207,18	2 575,94	
Sulawesi Utara	839,28	811,69	1 650,97	843,58	816,24	1 659,81	
Sulawesi Tengah	911,55	870,35	1 781,90	918,91	877,89	1 796,80	
Sulawesi Selatan	2 665,98	2 924,81	5 590,80	2 677,94	2 938,77	5 616,71	
Sulawesi Tenggara	728,21	741,42	1 469,63	734,75	748,13	1 482,88	
Gorontalo	356,51	361,09	717,60	360,19	365,06	725,24	
Sulawesi Barat	373,18	381,14	754,32	377,57	385,75	763,32	
Maluku	498,12	499,57	997,69	504,49	505,79	1 010,29	
Maluku Utara	346,89	332,97	679,86	350,50	336,78	687,28	
Papua Barat	274,84	238,91	513,75	279,32	242,89	522,21	
Papua	1 009,78	899,63	1 909,40	1 036,08	922,82	1 958,89	
Indonesia	85 155,63	85 500,51	170 656,14	85 710,83	86 045,25	171 756,08	

Lampiran 2. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Ribu Jiwa)

D		Februari			Agustus	
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	1 255,11	813,85	2 068,95	1 251,53	749,73	2 001,26
Sumatera Utara	3 643,13	2 770,82	6 413,95	3 606,88	2 707,36	6 314,24
Sumatera Barat	1 350,59	925,41	2 276,00	1 361,07	852,44	2 213,51
Riau	1 649,67	944,45	2 594,11	1 701,18	859,23	2 560,40
Jambi	970,62	556,84	1 527,46	983,05	512,12	1 495,17
Sumatera Selatan	2 274,09	1 486,14	3 760,23	2 313,77	1 456,90	3 770 , 67
Bengkulu	526,33	367,39	893,73	534,05	360,89	894,93
Lampung	2 426,27	1 420,92	3 847,18	2 431,04	1 265,03	3 696,07
Bangka-Belitung	397,49	209,95	607,44	401,70	210,00	611,70
Kepulauan Riau	542,22	294,39	836,61	555,92	292,08	848,00
DKI Jakarta	3 095,46	1 914,37	5 009,83	3 166,34	1 977,49	5 143,83
Jawa Barat	13 165,82	6 989,67	20 155,49	12 998,30	6 358,32	19 356,62
Jawa Tengah	9 858,32	7 326,62	17 184,93	9 760,43	7 158,37	16 918,80
DIY	1 060,39	896,15	1 956,54	1 042,46	830,45	1 872,91
Jawa Timur	11 882,72	8 368,95	20 251,67	11 742,92	8 018,96	19 761,89
Banten	3 282,05	1 882,63	5 164,68	3 370,35	1 839,88	5 210,22
Bali	1 252,66	1 042,92	2 295,57	1 241,90	1 015,36	2 257,26
Nusa Tenggara Barat	1 229,24	944,93	2 174,16	1 228,19	844,60	2 072,78
Nusa Tenggara Timur	1 222,76	1 012,13	2 234,89	1 209,50	944,76	2 154,26
Kalimantan Barat	1 329,24	927,63	2 256,87	1 330,37	902,82	2 233,20
Kalimantan Tengah	714,41	421,5 0	1 135,92	718,90	415,69	1 134,59
Kalimantan Selatan	1 135,60	704,93	1 840,53	1 161,00	764,68	1 925,68
Kalimantan Timur	1 162,79	550,10	1 712,90	1 230,87	533,83	1 764,70
Sulawesi Utara	708,31	360,11	1 068,42	708,26	375,94	1 084,20
Sulawesi Tengah	799,03	507 , 27	1 306,30	811,01	50 2, 67	1 313,68
Sulawesi Selatan	2 245,59	1 388,77	3 634,36	2 272,45	1 339,97	3 612,42
Sulawesi Tenggara	637,93	426,44	1 064,37	644,54	414,46	1 059,00
Gorontalo	291,81	166,77	458,58	299,73	165,29	465,03
Sulawesi Barat	326,76	247,13	573,89	325,60	226,03	551,63
Maluku	407,25	285,42	69 2, 67	416,35	285,55	701,89
Maluku Utara	292,35	185,18	477,52	291,91	171,69	463,60
Papua Barat	231,90	135,41	367,31	234,08	135,54	369,62
Papua	891,95	664,39	1 556,34	905,90	630,83	1 536,73
Indonesia	72 259,82	47 139,55	119 399,38	72 251,52	45 118,96	117 370,49

Lampiran 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

Provinsi		Februari		Agustus			
PTOVIIISI	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Aceh	81,80	51,82	66,64	80,73	47,23	63,78	
Sumatera Utara	84,88	62,53	73,53	83,69	60,85	72,09	
Sumatera Barat	83,36	54,23	68,42	83,56	49,69	66,19	
Riau	84,35	51,36	68,36	85,57	45,97	66,38	
Jambi	87,05	52,05	69,91	87,19	47,33	67,67	
Sumatera Selatan	85,32	57,31	71,51	86,14	55,74	71,15	
Bengkulu	85,76	62,28	74,25	86,38	60,77	73,83	
Lampung	87,13	54,15	71,13	86,86	47,97	68,00	
Bangka-Belitung	86,42	49,81	68,92	86,12	49,13	68,43	
Kepulauan Riau	86,16	49,18	68,14	86,29	47,69	67,48	
DKI Jakarta	83,15	52,44	67,94	84,56	53,87	69,36	
Jawa Barat	84,27	45,97	65,38	82,51	41,47	62,27	
Jawa Tengah	84,07	60,24	71,94	83,18	58,81	70,77	
DIY	80,00	64,58	72,11	78,35	59,61	68,77	
Jawa Timur	85,93	57,56	71,39	84,70	55,01	69,49	
Banten	84,80	50,59	68,03	86,00	48,83	67,79	
Bali	85,74	71,25	78,49	84,20	68,71	76,45	
Nusa Tenggara Barat	83,35	57,44	69,69	82,88	51,09	66,12	
Nusa Tenggara Timur	84,47	66,21	75,10	82,79	61,25	71,72	
Kalimantan Barat	86,51	62,93	74,97	86,29	61,04	73,93	
Kalimantan Tengah	88,11	57,39	73,51	88,05	56,16	72,89	
Kalimantan Selatan	86,80	54,4 0	70,68	87,94	58,53	73,31	
Kalimantan Timur	86,43	46,37	67,66	89,93	44,22	68,51	
Sulawesi Utara	84,39	44,37	64,71	83,96	46,06	65,32	
Sulawesi Tengah	87,66	58,28	73,31	88,26	57,26	73,11	
Sulawesi Selatan	84,23	47,48	65,01	84,86	45, 60	64,32	
Sulawesi Tenggara	87,60	57,52	72,42	87,72	55,40	71,42	
Gorontalo	81,85	46,18	63,90	83,22	45,28	64,12	
Sulawesi Barat	87,56	64,84	76,08	86,24	58,60	72,27	
Maluku	81,76	57,13	69,43	82,53	56,46	69,47	
Maluku Utara	84,28	55,61	70,24	83,28	50,98	67,45	
Papua Barat	84,38	56,68	71,50	83, 80	55,80	70,78	
Papua	88,33	73,85	81,51	87,44	68,36	78,45	
Indonesia	84,86	55,13	69,96	84,30	52,44	68,34	

Lampiran 4. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Ribu Jiwa)

D		Februari		Agustus			
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Aceh	1 164,56	733,34	1 897,90	1 166,46	686,02	1 852,47	
Sumatera Utara	3 449,50	2 503,84	5 953,34	3 422,70	2 489,41	5 912,11	
Sumatera Barat	1 266,71	846,79	2 113,51	1 277,40	793,32	2 070,73	
Riau	1 563,64	844,57	2 408,20	1 632,31	791,87	2 424,18	
Jambi	944,14	524,52	1 468,66	941,49	493,51	1 435,00	
Sumatera Selatan	2 149,40	1 382,74	3 532,14	2 196,07	1 357,03	3 553,10	
Bengkulu	509,70	353,58	863,28	522,57	351,15	873,72	
Lampung	2 339,02	1 306,68	3 645,70	2 332,19	1 150,12	3 482,30	
Bangka-Belitung	387,91	199,81	587,72	390,73	198,91	589,63	
Kepulauan Riau	507,27	270,46	777,73	519,15	262,67	781,82	
DKI Jakarta	2 796,11	1 671,01	4 467,12	2 867,96	1 720,46	4 588,42	
Jawa Barat	11 834,58	6 338,46	18 173,04	11 739,48	5 715,30	17 454,78	
Jawa Tengah	9 279,38	6 863,06	16 142,44	9 241,38	6 674,76	15 916,14	
DIY	995,28	854,15	1 849,43	1 002,05	796,54	1 798,60	
Jawa Timur	11 375,33	8 030,69	19 406,03	11 346,94	7 593,40	18 940,34	
Banten	2 882,18	1 585,42	4 467,60	2 968,67	1 560,99	4 529,66	
Bali	1 219,26	1 010,71	2 229,97	1 217,18	987,69	2 204,87	
Nusa Tenggara Barat	1 161,01	896,75	2 057,75	1 183,69	778,55	1 962,24	
Nusa Tenggara Timur	1 192,25	982,98	2 175,23	1 179,75	916,51	2 096,26	
Kalimantan Barat	1 264,43	879,92	2 144,34	1 289,56	857,01	2 146,57	
Kalimantan Tengah	694,97	399,35	1 094,32	705,99	399,71	1 105,70	
Kalimantan Selatan	1 075,62	661,41	1 737,03	1 110,61	714,32	1 824,93	
Kalimantan Timur	1 043,18	494,91	1 538,09	1 111,20	479,8 0	1 591,00	
Sulawesi Utara	665,62	304,57	970,19	669,91	320,81	990,72	
Sulawesi Tengah	775,75	474,74	1 250,49	792,10	468,90	1 261,00	
Sulawesi Selatan	2 121,78	1 269,55	3 391,33	2 155,59	1 219,91	3 375,50	
Sulawesi Tenggara	618,25	399,88	1 018,13	629,47	397,08	1 026,55	
Gorontalo	281,71	155,75	437,46	292,34	152,87	445,21	
Sulawesi Barat	319,05	239,34	558,38	317,45	218,60	536,05	
Maluku	383,56	255,62	639,18	393,83	256,28	650,11	
Maluku Utara	282,16	168,53	450,69	280,91	156,96	437,87	
Papua Barat	215,90	120,99	336,89	214,63	121,96	336,59	
Papua	863,99	634,47	1 498,45	878,17	598,06	1 476,23	
Indonesia	67 623,21	43 658,54	111 281,74	67 989,94	41 680,46	109 670,40	

Lampiran 5. Employment to Population Ratio (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011

D		Februari		Agustus		
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	75,90	46,70	61,13	75,25	43,22	59,04
Sumatera Utara	80,37	56,51	68,25	79,42	55,95	67,50
Sumatera Barat	78,18	49,62	63,53	78,42	46,24	61,92
Riau	79,95	45,93	63,46	82, 10	42,37	62,85
Jambi	84,67	49,03	67,22	83,50	45,61	64,95
Sumatera Selatan	80,64	53,33	67,17	81,75	51,92	67,04
Bengkulu	83,05	59,94	71,72	84,52	59,13	72,08
Lampung	84,00	49,80	67,41	83,33	43,62	64,06
Bangka-Belitung	84,34	47,41	66,68	83,77	46,53	65,96
Kepulauan Riau	80,61	45,19	63,34	80,59	42,89	62,21
DKI Jakarta	75,11	45,78	60,58	76,59	46,86	61,87
Jawa Barat	75,75	41,69	58,95	74,52	37,28	56,15
Jawa Tengah	79,14	56,43	67,57	78,76	54,84	66,58
DIY	75,09	61,55	68,16	75,32	57,18	66,04
Jawa Timur	82,26	55,23	68,41	81,85	52,09	66,60
Banten	74,47	42,61	58,85	75,75	41,43	58,93
Bali	83,46	69,05	76,24	82,53	66,84	74,68
Nusa Tenggara Barat	78,72	54,51	65,95	79,88	47,10	62,59
Nusa Tenggara Timur	82,37	64,31	73,09	80,75	59,41	69,79
Kalimantan Barat	82,29	59,69	71,23	83,64	57,95	71,06
Kalimantan Tengah	85,71	54,37	70,82	86,47	54, 00	71,03
Kalimantan Selatan	82,22	51,04	66,70	84,13	54,67	69,48
Kalimantan Timur	77,54	41,72	60,75	81,18	39,75	61,76
Sulawesi Utara	79,31	37,52	58,76	79,41	39,30	59,69
Sulawesi Tengah	85,10	54,55	70,18	86,20	53,41	70,18
Sulawesi Selatan	79,59	43,41	60,66	80,49	41,51	60,10
Sulawesi Tenggara	84,90	53,94	69,28	85, 67	53,08	69,23
Gorontalo	79,02	43,13	60,96	81,16	41,87	61,39
Sulawesi Barat	85,49	62,80	74,03	84,08	56,67	70,23
Maluku	77,00	51,17	64,07	78,07	50,67	64,35
Maluku Utara	81,34	50,61	66,29	80,14	46,61	63,71
Papua Barat	78,55	50,64	65,57	76,84	50,21	64,45
Papua	85,56	70,53	78,48	84,76	64,81	75,36
Indonesia	79,41	51,06	65,21	79,32	48,44	63,85

Lampiran 6. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

Provinsi	Pekerja dengan Upah/gaji		Pengr	ısaha	Berusaha	a Sendiri
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	30,27	33,48	4,02	4,85	41,84	36,85
Sumatera Utara	29,30	35,09	3,61	3,41	36,54	35,23
Sumatera Barat	25,48	30,07	4,51	5,54	40,13	39,18
Riau	37,39	38,51	5,07	4,93	36,05	35,18
Jambi	27,62	36,11	4,81	4,38	39,57	34,38
Sumatera Selatan	26,13	30,15	3,06	3,16	41,88	37,74
Bengkulu	22,80	29,53	2,80	2,66	41,09	37,40
Lampung	21,03	26,05	3,38	3,33	40,18	39,10
Bangka-Belitung	42,47	46,23	6,65	6,61	31,59	31,92
Kepulauan Riau	62,82	67,50	3,67	4,83	25,66	21,65
DKI Jakarta	64,08	64,91	4,34	4,21	22,51	23,52
Jawa Barat	33,31	40,12	2,83	3,33	39,99	33,29
Jawa Tengah	25,96	28,19	2,90	2,97	40,00	37,31
DIY	39,34	40,12	4,27	4,27	32,78	33,26
Jawa Timur	26,27	28,97	3,10	3,27	38,00	35,56
Banten	48,79	52,57	2,83	2,65	28,46	28,08
Bali	36,05	39,96	2,99	3,61	34,59	33,14
Nusa Tenggara Barat	20,37	21,87	2,39	2,94	44,72	41,84
Nusa Tenggara Timur	17,68	19,08	1,65	1,42	42,43	44,32
Kalimantan Barat	25,96	26,41	2,10	3,39	40,49	39,99
Kalimantan Tengah	34,67	37,27	2,64	2,79	37,96	35,93
Kalimantan Selatan	29,91	30,99	3,93	3,22	41,75	39,45
Kalimantan Timur	51,64	49,78	4,06	4,06	29,80	31,76
Sulawesi Utara	34,62	35,09	4,85	4,28	39,38	38,89
Sulawesi Tengah	24,49	24,51	4,25	4,5 0	44,16	40,91
Sulawesi Selatan	27,45	29,03	4,05	4,05	42,27	41,31
Sulawesi Tenggara	26,28	28,81	3,02	3, 00	42,31	40,07
Gorontalo	27,61	30,74	2,46	3, 87	41,54	41,71
Sulawesi Barat	25,79	22,20	2,40	2,09	40,35	42,69
Maluku	23,23	24,25	2,18	2,00	46,84	45,66
Maluku Utara	28,02	25,76	3,13	3,39	39,78	42,22
Papua Barat	31,86	36,25	3,19	1,96	39,94	37,74
Papua	17,81	19,09	1,53	1,07	41,69	43,53
Indonesia	31,01	34,44	3,23	3,39	38,15	35,63

Lampiran 6. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011 **(Persen)**

D : :	Pekerja	Bebas	Pekerja l	Keluarga	Rasio Peko	Rasio Pekerja Rentan	
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	
Aceh	4,71	6,30	19,15	18,52	65,71	61,67	
Sumatera Utara	5,79	8,27	24,77	18,00	67,09	61,49	
Sumatera Barat	11,85	10,66	18,03	14,55	70,01	64,39	
Riau	6,46	7,22	15,03	14,16	57,54	56,56	
Jambi	6 , 67	8, 80	21,33	16,34	67,57	59,51	
Sumatera Selatan	5,44	5, 97	23,48	22,98	70,80	66,69	
Bengkulu	5,82	8,03	27,49	22,38	74,40	67,81	
Lampung	9,47	10,24	25,93	21,28	75,59	70,62	
Bangka-Belitung	4,93	6, 00	14,36	9,23	50,88	47,16	
Kepulauan Riau	2,00	2,78	5,85	3,24	33,52	27,67	
DKI Jakarta	3,41	2,54	5,67	4,83	31,58	30,89	
Jawa Barat	13,92	14,36	9,94	8,90	63,86	56,55	
Jawa Tengah	14,35	13,64	16,79	17,89	71,14	68,84	
DIY	8,59	8 , 40	15,02	13,95	56,39	55,61	
Jawa Timur	12,07	13,12	20,56	19,09	70,63	67,77	
Banten	9,73	9,61	10,19	7,09	48,38	44,78	
Bali	8,44	8,61	17,93	14,68	60,96	56,43	
Nusa Tenggara Barat	11,94	16,12	20,58	17,23	77,24	75,18	
Nusa Tenggara Timur	3,39	3,04	34,85	32,13	80,67	79,49	
Kalimantan Barat	3,62	3,11	27,83	27,10	71,94	70,20	
Kalimantan Tengah	2,23	3,05	22,5 0	20,96	62,69	59,94	
Kalimantan Selatan	4,18	6,27	20,23	20,07	66,16	65,79	
Kalimantan Timur	3,62	2,67	10,88	11,73	44,3 0	46,16	
Sulawesi Utara	9,85	11,66	11,30	10,08	60,53	60,63	
Sulawesi Tengah	4,36	7,52	22,73	22,56	71,26	70,99	
Sulawesi Selatan	4,96	5,49	21,27	20,12	68,50	66,92	
Sulawesi Tenggara	3,50	4,74	24,89	23,37	70,70	68,19	
Gorontalo	13,68	10,53	14,72	13,15	69,93	65,40	
Sulawesi Barat	3,54	6,86	27,93	26,16	71,81	75,71	
Maluku	2,2 0	3,03	25,55	25,06	74,59	73,75	
Maluku Utara	4,85	5,97	24,21	22,66	68,85	70,85	
Papua Barat	1,92	2,13	23,09	21,92	64,95	61,79	
Papua	1,07	1,26	37,89	35,04	80,66	79,83	
Indonesia	9,65	10,14	17,96	16,40	65,76	62,17	

Lampiran 7. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011

Provinsi	1. Per	tanian	2. Pertan	nbangan	3 Inc	lustri
PTOVIIISI	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	47,60	48,49	0,72	0,63	6,55	3,91
Sumatera Utara	50,90	43,90	0,75	0,51	6, 07	8,19
Sumatera Barat	44,14	39,30	2,43	1,44	7,6 0	7,39
Riau	43,65	44,80	1,16	1,55	6,14	6,01
Jambi	57,95	53,72	0,95	1,5 0	2,51	3,4 0
Sumatera Selatan	55,82	57,12	1,46	1,19	6,01	4,73
Bengkulu	62,27	52,24	1,10	1,09	3,53	2,90
Lampung	53,21	49,26	0,87	0,78	7,94	10,30
Bangka-Belitung	30,03	25,93	21,12	25,19	5,52	5,46
Kepulauan Riau	16,51	12,50	1,42	2,04	19,20	24,99
DKI Jakarta	1,97	0,66	0,31	0,33	14,08	15,06
Jawa Barat	22,02	21,06	0,84	0,75	19,23	20,46
Jawa Tengah	36,05	33,78	0,45	0,50	18,22	19,14
DIY	24,31	23,97	0,99	0,69	14,17	14,83
Jawa Timur	42,34	39,70	0,65	0,70	13,01	14,07
Banten	18,39	13,91	0,79	1,39	18,08	25,18
Bali	28,84	25,24	0,57	0,57	13,06	13,16
Nusa Tenggara Barat	46,93	44,44	1,04	2,53	7,29	8,64
Nusa Tenggara Timur	67,30	64,89	1,26	1,13	5,12	5,95
Kalimantan Barat	63,00	60,30	1,84	3,66	3,17	4,17
Kalimantan Tengah	56,60	54,75	4,99	5,47	3,02	2,83
Kalimantan Selatan	41,66	41,45	2,93	4,07	9,72	6,42
Kalimantan Timur	29,41	28,55	9,03	10,22	5,19	5,31
Sulawesi Utara	34,93	32,41	4,15	2,50	7,14	6,66
Sulawesi Tengah	50,26	51,92	3,41	2,08	4,13	5,21
Sulawesi Selatan	46,95	43,53	0,88	0,86	6,35	6,61
Sulawesi Tenggara	45,34	45,51	3,18	3,72	6,49	5,04
Gorontalo	41,13	35,74	4, 00	3,37	9,28	9,89
Sulawesi Barat	56,83	58,91	0,83	1,05	6,64	5,78
Maluku	50,43	49,45	0,54	0,91	9,05	6,97
Maluku Utara	50,97	55,12	2,94	1,74	3,82	2,46
Papua Barat	51,59	48,48	3,36	2,65	3,03	3,44
Papua	72,93	70,21	0,99	2,25	1,64	1,35
Indonesia	38,17	35,86	1,22	1,34	12,31	13,26

Lampiran 7. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

D	4. Listrik, C	Gas dan Air	5. Kor	nstruksi	6. Perdaga	ngan, RDA
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	0,20	0,21	4, 70	6,15	14,90	16,15
Sumatera Utara	0,15	0,19	3,16	5,63	17,62	20,45
Sumatera Barat	0,21	0,44	4,89	6,18	18,45	21,33
Riau	0,21	0,42	4,03	5,15	21,21	20,25
Jambi	0,18	0,32	2,29	4,4 0	17,84	16,11
Sumatera Selatan	0,15	0,17	3,77	3,51	15,78	15,72
Bengkulu	0,33	0,32	3,17	4,99	14,24	18,43
Lampung	0,10	0,10	3,61	4,68	18,35	17,40
Bangka-Belitung	0,33	0,24	4,5 0	4,55	22,00	18,98
Kepulauan Riau	0,25	0,58	7,48	7,64	24,25	24,80
DKI Jakarta	0,52	0,35	3,95	3,55	33,92	35,79
Jawa Barat	0,26	0,20	6,44	6,85	26,76	26,09
Jawa Tengah	0,18	0,18	5,99	6,89	20,92	21,38
DIY	0,31	0,24	5,61	7,40	25,97	26,70
Jawa Timur	0,20	0,13	5,13	6,12	20,08	20,63
Banten	0,47	0,40	5,05	5,12	24,60	24,69
Bali	0,20	0,31	8,19	8,42	27,81	27,05
Nusa Tenggara Barat	0,31	0,13	4,99	4,55	19,87	18,87
Nusa Tenggara Timur	0,13	0,12	2,82	2,83	6,77	7,03
Kalimantan Barat	0,26	0,21	4,11	4,54	13,74	12,92
Kalimantan Tengah	0,27	0,34	3,59	4,71	13,57	14,27
Kalimantan Selatan	0,19	0,24	4,44	5,20	19,60	21,38
Kalimantan Timur	0,55	0,44	5,47	5,36	20,86	22,90
Sulawesi Utara	0,25	0,47	6,31	8,32	19,24	19,80
Sulawesi Tengah	0,16	0,14	4,49	4,56	13,17	15,10
Sulawesi Selatan	0,12	0,23	4,49	5,29	17,67	19,39
Sulawesi Tenggara	0,15	0,19	3,74	5,29	17,80	16,55
Gorontalo	0,27	0,04	3,67	6,43	14,63	14,79
Sulawesi Barat	0,37	0,23	4,14	3,87	11,57	13,47
Maluku	0,12	0,37	3,04	3,59	14,26	14,30
Maluku Utara	0,17	0,18	4,15	4,16	12,22	12,63
Papua Barat	0,34	0,07	3, 90	4,82	12,37	16,73
Papua	0,16	0,20	1,99	2,46	7,89	8,86
Indonesia	0,23	0,22	5,02	5,78	20,88	21,33

Lampiran 7. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

ъ	7. Transpor	tasi, dan PK	8. Lembaga	a Keuangan	9. Jasa Ker	nasyaraktan
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	3,61	3,73	0,96	1,35	20,76	19,36
Sumatera Utara	5,40	4,18	1,29	2,00	14,65	14,96
Sumatera Barat	4,32	5,17	1,31	1,96	16,66	16,79
Riau	4,41	3,93	2,42	2,32	16,77	15,55
Jambi	3,74	4,01	1,14	1,59	13,39	14,96
Sumatera Selatan	3,73	3,65	1,12	1,72	12,16	12,20
Bengkulu	2,75	3,00	0,78	1,69	11,84	15,34
Lampung	3,81	3,72	0,70	1,16	11,41	12,60
Bangka-Belitung	2,15	2,24	1,41	1,90	12,95	15,51
Kepulauan Riau	9,12	6,21	2,64	3,42	19,12	17,81
DKI Jakarta	11,45	8 , 57	7,86	9,61	25,93	26,08
Jawa Barat	7,02	6,28	2,25	2,84	15,19	15,46
Jawa Tengah	3,78	3,54	1,24	1,66	13,17	12,92
DIY	4,71	3,79	2,18	2,78	21,76	19,60
Jawa Timur	3,78	3,75	1,37	1,91	13,45	12,98
Banten	7,87	6,53	4,38	4,45	20,38	18,34
Bali	4,23	3,71	2,88	3,78	14,23	17,75
Nusa Tenggara Barat	5,21	4,36	0,85	1,51	13,51	14,97
Nusa Tenggara Timur	3,90	4,17	0,53	0,99	12,17	12,89
Kalimantan Barat	2,15	2,40	0,83	0,98	10,90	10,82
Kalimantan Tengah	2,80	2,66	0,78	1,30	14,38	13,68
Kalimantan Selatan	4,18	4,26	0,84	1,96	16,45	15,03
Kalimantan Timur	4,6 0	4,83	3,2 0	3,03	21,70	19,35
Sulawesi Utara	7,18	7,37	2,03	2,31	18,77	20,15
Sulawesi Tengah	4,82	3,51	0,89	1,25	18,67	16,21
Sulawesi Selatan	4,37	5,37	1,20	1,65	17,96	17,06
Sulawesi Tenggara	3,97	5,5 0	0,77	1,12	18,57	17,08
Gorontalo	5,83	7,77	1,27	1,44	19,91	20,53
Sulawesi Barat	4,18	2,74	0,95	0,84	14,50	13,11
Maluku	5,13	5,67	1,05	1,22	16,38	17,50
Maluku Utara	6,01	6,34	0,66	0,67	19,05	16,71
Papua Barat	5,73	5,05	1,12	1,3 0	18,56	17,45
Papua	2,82	3,54	0,87	1,12	10,71	10,02
Indonesia	5,02	4,63	1,85	2,40	15,30	15,18

Lampiran 8. Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari dan Agustus 2011

Provinsi	Jumlah Pek Wal (Rib	ktu			Pekerja Pa	Share Perempuan Pada Pekerja Paruh Waktu (%)	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	
Aceh	410,30	563,99	21,62	30,45	57,46	53,96	
Sumatera Utara	1 251,14	1 203,04	21,02	20,35	61,54	57,11	
Sumatera Barat	441,64	489,65	20,90	23,65	57,63	49,50	
Riau	482,02	551,81	20,02	22,76	53,80	43,33	
Jambi	357,01	484,57	24,31	33,77	47,22	47,08	
Sumatera Selatan	836,27	948,36	23,68	26,69	52,28	48,23	
Bengkulu	136,45	195,73	15,81	22,40	56,09	58,61	
Lampung	658,85	893,71	18,07	25,66	56,33	45,98	
Bangka-Belitung	85,19	125,02	14,5 0	21,20	61,28	51,06	
Kepulauan Riau	76,09	76,42	9,78	9,78	56,86	53,99	
DKI Jakarta	258,02	252,72	5,78	5,51	57,32	61,24	
Jawa Barat	2 320,93	2 081,54	12,77	11,93	59,34	53,27	
Jawa Tengah	2 198,32	2 967,75	13,62	18,65	63,91	58,44	
DIY	148,30	364,94	8,02	20,29	61,54	59,03	
Jawa Timur	3 312,06	3 796,26	17,07	20,04	62,15	57,68	
Banten	420,92	433,64	9,42	9,57	62,30	59,43	
Bali	186,15	335,62	8,35	15,22	59,82	59,61	
Nusa Tenggara Barat	342,24	426,10	16,63	21,72	66,57	53,36	
Nusa Tenggara Timur	621,48	730,99	28,57	34,87	59,81	57,71	
Kalimantan Barat	482,05	554,60	22,48	25,84	61,15	55,45	
Kalimantan Tengah	213,33	257,82	19,49	23,32	58,20	55,69	
Kalimantan Selatan	393,88	475,59	22,68	26,06	57,38	53,27	
Kalimantan Timur	212,33	216,00	13,80	13,58	57,61	51,50	
Sulawesi Utara	143,71	164,28	14,81	16,58	50,11	46,61	
Sulawesi Tengah	277,40	321,65	22,18	25,51	58,69	49,68	
Sulawesi Selatan	920,41	894,69	27,14	26,51	51,44	43,55	
Sulawesi Tenggara	213,52	270,25	20,97	26,33	54,79	55,95	
Gorontalo	102,12	92,17	23,34	20,70	59,29	51,71	
Sulawesi Barat	176,91	214,80	31,68	40,07	60,27	50,56	
Maluku	139,53	153,24	21,83	23,57	64,19	54,79	
Maluku Utara	99,02	115,69	21,97	26,42	61,71	55,07	
Papua Barat	85,32	72,59	25,33	21,57	55,93	56,84	
Papua	454,91	338,79	30,36	22,95	57,48	53,50	
Indonesia	18 457,79	21 064,03	16,59	19,21	59,28	54,21	

Lampiran 9. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

Duorringi	0 ja	ım*	1 - 1	4 jam	15 - 2	4 jam
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	1,63	4,11	6,68	8,98	15,18	20,90
Sumatera Utara	1,62	1,86	4,92	4,94	12,87	12,64
Sumatera Barat	2,40	4, 07	6,88	7,88	13,09	13,94
Riau	2,02	1,37	8,01	7,66	14,52	13,77
Jambi	1,46	1,92	6,26	5,79	14,53	16,55
Sumatera Selatan	2,11	1,97	4,19	6,09	12, 70	16,16
Bengkulu	1,35	2,95	3,38	5,34	8,85	11,67
Lampung	1,83	2,65	5,95	7,49	13,58	14,34
Bangka-Belitung	3,05	2,10	6,34	3,37	12,1 0	11,06
Kepulauan Riau	3,79	1,75	3,24	2,47	6,94	5,11
DKI Jakarta	1,86	0,93	2,25	2,36	4,23	3,69
Jawa Barat	1,92	2,53	4,20	4,06	9,11	8,91
Jawa Tengah	2,01	2,57	5,21	6,08	10,66	11,26
DIY	2,64	2,35	6,02	6,64	7,28	8,47
Jawa Timur	1,6 0	1,46	6,95	6,95	12,57	12,57
Banten	1,72	1,95	3,82	3,43	7,82	7,47
Bali	1,28	0,96	4,39	4, 60	7,80	8,5 0
Nusa Tenggara Barat	2,79	3,68	8,95	10,92	13,83	14,87
Nusa Tenggara Timur	2,59	2,29	7,13	9,37	16,72	18,15
Kalimantan Barat	1,95	1,84	6,28	6,02	19,21	16,98
Kalimantan Tengah	1,06	1,48	3,89	3,88	11,87	12,23
Kalimantan Selatan	2,89	5, 00	6,41	7,09	14,09	14,34
Kalimantan Timur	2,23	2,28	4,16	3,34	7,31	7,97
Sulawesi Utara	2,80	2,38	4,18	5,56	10,20	11,01
Sulawesi Tengah	3,18	6,81	6,90	9,71	12,58	14,93
Sulawesi Selatan	3,65	5,26	8,43	11,68	14,29	15,09
Sulawesi Tenggara	3,93	6,03	8,77	10,61	12,35	14,71
Gorontalo	2,42	6,57	7,73	6,27	10,38	10,75
Sulawesi Barat	3,68	6,81	12,69	18,39	14,30	20,63
Maluku	2,42	2,81	3,94	7,31	11,74	15,68
Maluku Utara	3,22	3,23	8,34	8,17	15,13	14,60
Papua Barat	2,45	2,18	4,75	3,93	12,38	11,42
Papua	1,04	0,70	3,43	2,46	13,52	10,39
Indonesia	2,01	2,40	5,54	6,05	11,35	11,75

Lampiran 9. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

ъ	25 - 3	34 jam	35 - 3	39 jam	40 -4	8 jam
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	19,00	19,47	12,11	11,75	23,69	18,22
Sumatera Utara	15,51	15,00	13,75	11,45	27,04	30,84
Sumatera Barat	15,87	14,64	9,99	11,36	22,64	22,06
Riau	14,11	16,26	9,27	9,97	25,37	26,10
Jambi	19,82	22,41	14,57	12,91	23,08	20,02
Sumatera Selatan	18,70	18,72	10,67	12,08	22,30	21,38
Bengkulu	13,1 0	15,5 0	12,83	13,45	27,36	23,91
Lampung	15,80	16,91	10,57	11,06	23,93	23,03
Bangka-Belitung	13,05	13,54	9,62	10,33	32,98	34,94
Kepulauan Riau	11,63	6,18	6,32	6,42	32,76	38,36
DKI Jakarta	7,05	4,91	6,17	6,00	41,31	45,46
Jawa Barat	10,48	10,95	9,60	8,67	31,63	34,32
Jawa Tengah	13,08	13,50	10,32	10,32	28,48	28,33
DIY	10,60	12,28	9,18	10,83	30,00	31,10
Jawa Timur	14,84	14,16	10,24	9,76	24,16	27,48
Banten	9,09	8,60	6,54	7,17	38,97	41,34
Bali	9,95	10,48	8,83	8,87	22,70	28,90
Nusa Tenggara Barat	14,81	18,07	10,02	12,03	20,78	18,87
Nusa Tenggara Timur	21,92	20,23	12,88	14,07	25,71	22,59
Kalimantan Barat	16,00	16,75	11,11	11,15	24,20	24,49
Kalimantan Tengah	16,73	16,53	12,67	11,31	25,48	28,84
Kalimantan Selatan	18,75	16,90	11,50	10,65	23,80	24,42
Kalimantan Timur	11,92	11,53	11,52	10,68	27,06	26,18
Sulawesi Utara	11,74	12,79	11,82	10,82	31,54	34,14
Sulawesi Tengah	17,57	16,13	12,44	11,14	22,80	20,21
Sulawesi Selatan	16,44	14,36	12,52	10,21	20,17	20,11
Sulawesi Tenggara	17,66	14,38	10,44	9,54	19,75	18,28
Gorontalo	12,78	13,92	8,36	12,02	24,31	19,27
Sulawesi Barat	19,06	16,44	9,70	11,47	21,59	13,27
Maluku	18,00	17,74	14,11	11,58	26,95	21,16
Maluku Utara	16,22	18,90	11,21	13,58	24,63	21,07
Papua Barat	16,17	17,32	14,23	11,43	24,72	28,25
Papua	20,20	19,86	17,05	19,29	31,10	32,53
Indonesia	13,84	13,74	10,41	10,14	27,55	28,85

Lampiran 9. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

D	49 - 5	59 jam	Lanjutan. Lebih dari 60 jam		
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	
Aceh	13,13	9,80	8,58	6,77	
Sumatera Utara	10,83	11,74	13,48	11,52	
Sumatera Barat	15,03	14,61	14,09	11,43	
Riau	11,56	12,60	15,14	12,27	
Jambi	11,53	12,47	8,75	7,93	
Sumatera Selatan	16,53	13,85	12,80	9,75	
Bengkulu	21,47	17,08	11,66	10,09	
Lampung	18,16	15,83	10,18	8,68	
Bangka-Belitung	13,11	12,94	9,76	11,72	
Kepulauan Riau	17,44	18,97	17,89	20,74	
DKI Jakarta	14,12	15,59	23,00	21,06	
Jawa Barat	15,92	15,60	17,15	14,98	
Jawa Tengah	17,19	17,08	13,05	10,87	
DIY	20,99	17,50	13,28	10,84	
Jawa Timur	17,10	16,79	12,54	10,83	
Banten	14,23	16,19	17,81	13,83	
Bali	25,29	21,48	19,77	16,22	
Nusa Tenggara Barat	14,90	12,52	13,93	9,03	
Nusa Tenggara Timur	7,18	6,48	5,88	6,83	
Kalimantan Barat	12, 90	13,56	8,36	9,21	
Kalimantan Tengah	16,99	15,46	11,32	10,26	
Kalimantan Selatan	14,04	13,06	8,52	8,54	
Kalimantan Timur	16,28	17,96	19,51	20,06	
Sulawesi Utara	14,20	10,49	13,52	12,81	
Sulawesi Tengah	13,54	11,43	10,99	9,64	
Sulawesi Selatan	13,66	12,39	10,83	10,90	
Sulawesi Tenggara	17,54	15,42	9,55	11,02	
Gorontalo	17,39	17,74	16,64	13,46	
Sulawesi Barat	12,48	8,18	6,48	4,80	
Maluku	11,91	10,59	10,93	13,13	
Maluku Utara	12,65	11,60	8,60	8,87	
Papua Barat	10,21	12,73	15,08	12,75	
Papua	7,01	7,49	6,64	7,28	
Indonesia	15,54	15,07	13,76	12,00	

Lampiran 10. Persentase Pekerja Menurut Provinsi dan Sektor (Formal/Informal), Februari dan Agustus 2011 (Persen)

Decrinci	For	rmal	Informal		
Provinsi	Feb	Ags	Feb	Ags	
Aceh	38,92	42,28	61,08	57,72	
Sumatera Utara	39,08	44,67	60,92	55,33	
Sumatera Barat	38,22	43,55	61,78	56,45	
Riau	48,14	48,87	51,86	51,13	
Jambi	38,56	44,28	61,44	55,72	
Sumatera Selatan	34,77	37,87	65,23	62,13	
Bengkulu	30,91	37,12	69,09	62,88	
Lampung	31,28	36,82	68,72	63,18	
Bangka-Belitung	54,14	57,19	45,86	42,81	
Kepulauan Riau	69,81	76,10	30,19	23,90	
DKI Jakarta	75,90	76,61	24,10	23,39	
Jawa Barat	45,49	52,03	54,51	47,97	
Jawa Tengah	37,79	40,98	62,21	59,02	
DIY	52,33	53,49	47,67	46,51	
Jawa Timur	36,66	40,68	63,34	59,32	
Banten	58,20	61,78	41,80	38,22	
Bali	49,05	53,08	50,95	46,92	
Nusa Tenggara Barat	29,61	32,07	70,39	67,93	
Nusa Tenggara Timur	23,06	24,00	76,94	76,00	
Kalimantan Barat	32,99	34,24	67,01	65,76	
Kalimantan Tengah	41,93	44,41	58,07	55,59	
Kalimantan Selatan	41,62	41,85	58,38	58,15	
Kalimantan Timur	61,45	60,85	38,55	39,15	
Sulawesi Utara	45,95	45,41	54,05	54,59	
Sulawesi Tengah	34,63	35,88	65,37	64,12	
Sulawesi Selatan	38,90	41,06	61,10	58,94	
Sulawesi Tenggara	37,13	37,92	62,87	62,08	
Gorontalo	36,50	42,81	63,5 0	57,19	
Sulawesi Barat	35,18	30,64	64,82	69,36	
Maluku	31,25	31,69	68,75	68,31	
Maluku Utara	35,20	32,83	64, 80	67,17	
Papua Barat	38,68	42,19	61,32	57,81	
Papua	21,82	22,15	78,18	77,85	
Indonesia	41,63	45,34	58,37	54,66	

Lampiran 11. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

D		Februari			Agustus	Agustus		
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total		
Aceh	7,21	9,89	8,27	6,80	8,50	7,43		
Sumatera Utara	5,32	9,64	7,18	5,11	8,05	6,37		
Sumatera Barat	6,21	8,50	7,14	6,15	6,94	6,45		
Riau	5,21	10,58	7,17	4,05	7,84	5,32		
Jambi	2,73	5,80	3,85	4,23	3,63	4,02		
Sumatera Selatan	5,48	6,96	6, 07	5,09	6,85	5,77		
Bengkulu	3,16	3,76	3,41	2,15	2, 70	2,37		
Lampung	3, 60	8,04	5,24	4,07	9,08	5,78		
Bangka-Belitung	2,41	4,83	3,25	2,73	5,28	3,61		
Kepulauan Riau	6,45	8,13	7,04	6,61	10,07	7,80		
DKI Jakarta	9,67	12,71	10,83	9,42	13,00	10,80		
Jawa Barat	10,11	9,32	9,84	9,68	10,11	9,83		
Jawa Tengah	5,87	6,33	6,07	5,32	6,76	5,93		
DIY	6,14	4,69	5,47	3,88	4,08	3,97		
Jawa Timur	4,27	4,04	4,18	3,37	5,31	4,16		
Banten	12,18	15,79	13,50	11,92	15,16	13,06		
Bali	2,67	3,09	2,86	1,99	2,73	2,32		
Nusa Tenggara Barat	5,55	5,10	5,35	3,62	7,82	5,33		
Nusa Tenggara Timur	2,50	2,88	2,67	2,46	2,99	2,69		
Kalimantan Barat	4,88	5,14	4,99	3,07	5,07	3,88		
Kalimantan Tengah	2,72	5,26	3,66	1,79	3,84	2,55		
Kalimantan Selatan	5,28	6,17	5,62	4,34	6,59	5,23		
Kalimantan Timur	10,29	10,03	10,21	9,72	10,12	9,84		
Sulawesi Utara	6,03	15,42	9,19	5,41	14,67	8,62		
Sulawesi Tengah	2,91	6,41	4,27	2,33	6,72	4,01		
Sulawesi Selatan	5,51	8,58	6,69	5,14	8,96	6,56		
Sulawesi Tenggara	3,08	6,23	4,34	2,34	4,19	3,06		
Gorontalo	3,46	6,61	4,61	2,47	7,52	4,26		
Sulawesi Barat	2,36	3,15	2,70	2,50	3,29	2,82		
Maluku	5,82	10,44	7,72	5,41	10,25	7,38		
Maluku Utara	3,48	8,99	5,62	3,77	8,58	5,55		
Papua Barat	6,90	10,65	8,28	8,31	10,02	8,94		
Papua	3,13	4, 50	3,72	3,06	5,19	3,94		
Indonesia	6,42	7,38	6,80	5,90	7,62	6,56		

Lampiran 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011

		(1)	ersen)			
Provinsi		an Dasar awah	Pendidikan	Menengah	Pendidikan Tinggi	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	5,21	4,84	13,27	12,52	10,46	7,39
Sumatera Utara	4,14	4,11	11,75	10,02	13,59	8,74
Sumatera Barat	4, 37	4,61	10,39	10,54	14,78	6,27
Riau	4,3 0	3,07	11,30	9,75	11,08	6,15
Jambi	2,32	3,24	6,04	6,12	10,81	4,49
Sumatera Selatan	3,84	3,26	11,60	13,05	10,07	7,16
Bengkulu	1,65	1,48	5,96	3,81	11,71	4,19
Lampung	2,77	3,84	11,70	11,88	14,16	5,32
Bangka-Belitung	2,17	2,37	4,66	7,10	8,38	2,25
Kepulauan Riau	6,94	4,84	7,42	11,05	5,85	6,81
DKI Jakarta	5,3 0	9,74	14,14	12,26	12,88	9,47
Jawa Barat	8,78	8,43	12,50	13,93	10,46	9,79
Jawa Tengah	4,13	4,38	12,30	10,86	10,60	9,95
DIY	2,98	1,82	6,94	6,43	11,97	5,77
Jawa Timur	2, 90	2,81	7,82	7,98	6,48	6,74
Banten	10,42	13,30	19,73	14,64	13,27	6,61
Bali	1,59	1,34	4,57	3,49	5,91	4,31
Nusa Tenggara Barat	4,43	4,71	8,20	7,26	5,87	6,14
Nusa Tenggara Timur	1, 10	1,79	7,73	5,88	9,69	5,28
Kalimantan Barat	3,53	2,65	10,22	8,29	9,09	6,09
Kalimantan Tengah	2,67	1,83	4,20	4,49	10,93	3,83
Kalimantan Selatan	2, 70	4,35	13,94	7,98	11,16	6,20
Kalimantan Timur	5,77	8,60	14,61	12,42	16,41	7,29
Sulawesi Utara	4,91	6,09	15,47	12,61	16,32	10,45
Sulawesi Tengah	2, 90	2,87	8,42	7,27	3,89	5,03
Sulawesi Selatan	4,21	5,17	12,62	10,38	8,78	6,78
Sulawesi Tenggara	1,86	1,53	7,78	5,96	10,74	5,12
Gorontalo	1,92	3,43	16,25	6,51	4,32	6,77
Sulawesi Barat	1,67	1,51	5,11	8,80	6,64	1,89
Maluku	3,11	4,27	16,76	12,89	15,13	9,90
Maluku Utara	1, 70	2,88	13,74	10,37	11,57	10,50
Papua Barat	5,41	4,33	11,55	14,01	17,01	19,53
Papua	2,02	1,95	8,62	10,33	9,84	7,68
Indonesia	4,65	4,94	11,37	10,59	10,57	7,71

Lampiran 13. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

			T		I	
Provinsi	Pendidik Keba		Pendidikan	Menengah	Pendidika	an Tinggi
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	36,59	37,83	49,11	49,98	14,30	12,19
Sumatera Utara	35,78	38,77	48,56	51,17	15,66	10,05
Sumatera Barat	37,43	44,12	42,25	45,95	20,32	9,93
Riau	35,24	35,54	50,14	54,63	14,62	9,83
Jambi	41,78	54,22	34,88	34,64	23,34	11,14
Sumatera Selatan	44,25	39,55	44,82	51,24	10,93	9,21
Bengkulu	33,19	39,76	43,08	42,94	23,73	17,30
Lampung	39,19	46,78	43,05	47,09	17,76	6,12
Bangka-Belitung	45,58	42,86	34,86	51,91	19,56	5,23
Kepulauan Riau	50,73	26,67	41,93	61,47	7,34	11,86
DKI Jakarta	16,85	35,31	58,80	49,62	24,35	15,07
Jawa Barat	60,45	59,16	31,87	33,39	7,68	7,45
Jawa Tengah	51,09	55,71	37,87	34,15	11,04	10,14
DIY	28,07	23,65	46,80	56,57	25,13	19,79
Jawa Timur	50,10	49,07	39,02	41,01	10,88	9,91
Banten	45,86	61,04	43,41	34,09	10,72	4, 87
Bali	34,17	33,84	48,02	45,98	17,80	20,18
Nusa Tenggara Barat	59,59	63,12	34,12	26,69	6,29	10,19
Nusa Tenggara Timur	32,29	50,95	47,27	35,05	20,44	14,00
Kalimantan Barat	54,68	52,09	35,26	40,19	10,05	7,72
Kalimantan Tengah	52,72	50,87	21,94	35,61	25,34	13,52
Kalimantan Selatan	34,59	60,10	50,26	31,24	15,15	8,66
Kalimantan Timur	29,58	47,12	50,71	45,38	19,71	7,5 0
Sulawesi Utara	32,17	40,96	51,4 0	47,65	16,43	11,39
Sulawesi Tengah	45,59	50,28	45,73	39,83	8,68	9,89
Sulawesi Selatan	41,12	52,13	43,97	37,02	14,91	10,85
Sulawesi Tenggara	27,23	31,63	45,16	50,24	27,61	18,13
Gorontalo	31,38	59,37	61,73	27,97	6,89	12,66
Sulawesi Barat	45,36	39,74	34,89	54,96	19,75	5,29
Maluku	26,27	34,99	57,24	51,40	16,49	13,61
Maluku Utara	19,88	33,54	60,52	47,65	19,60	18,81
Papua Barat	40,87	28,88	37,44	43,96	21,69	27,16
Papua	41,01	36,67	43,42	49,92	15,57	13,41
Indonesia	45,88	50,49	41,22	39,93	12,90	9,57

Lampiran 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

		(P	ersen)			
Provinsi		an Dasar awah	Pendidikan	Menengah	Pendidika	an Tinggi
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	64,39	66,86	26,90	26,24	8,71	6,90
Sumatera Utara	60,67	63,86	29,18	29,63	10,15	6,51
Sumatera Barat	65,79	69,50	25,64	21,02	8,57	9,48
Riau	70,47	73,25	24,63	21,33	4,90	5,42
Jambi	75,32	71,24	18,80	20,55	5,88	8,21
Sumatera Selatan	72,28	75,44	23,02	18,95	4,70	5,61
Bengkulu	60,38	68,93	28,64	25,14	10,98	5,93
Lampung	77,29	73,66	16,93	19,67	5,78	6,67
Bangka-Belitung	79,16	71,47	15,02	21,86	5,82	6,68
Kepulauan Riau	52,51	68,06	34,59	24,82	12,90	7,13
DKI Jakarta	43,24	49,04	37,45	35,22	19,31	15,74
Jawa Barat	77,06	84,21	16,70	10,71	6,24	5,08
Jawa Tengah	82,71	82,78	13,21	13,00	4,08	4,22
DIY	56,34	58,10	28,36	33,87	15,31	8,02
Jawa Timur	81,30	81,89	14,24	13,64	4,47	4,47
Banten	81,57	76,76	12,22	15,63	6,21	7,61
Bali	78,24	69,79	15,00	21,76	6,75	8,44
Nusa Tenggara Barat	74,81	75,30	19,13	17,63	6,05	7,07
Nusa Tenggara Timur	80,53	78,49	14,94	19,01	4,52	2,50
Kalimantan Barat	79,40	78,31	15,72	17,91	4,88	3,77
Kalimantan Tengah	72,96	75,71	19,36	20,68	7,68	3,62
Kalimantan Selatan	79,03	77,52	16,30	18,19	4,67	4,29
Kalimantan Timur	59,17	63,28	28,39	27,61	12,44	9,11
Sulawesi Utara	68,14	69,26	25,26	26,63	6,6 0	4,11
Sulawesi Tengah	68,93	77,44	19,47	18,27	11,60	4,29
Sulawesi Selatan	68,92	73,77	22,22	19,15	8,86	7,08
Sulawesi Tenggara	61,55	68,49	25,51	27,31	12,94	4,2 0
Gorontalo	78,66	76,90	7,51	19,91	13,83	3,19
Sulawesi Barat	67,25	77,90	24,53	18,22	8,22	3,88
Maluku	68,97	62,44	25,86	28,95	5,17	8,61
Maluku Utara	73,98	74,83	19,78	21,48	6,25	3,69
Papua Barat	56,54	72,27	32,01	21,96	11,45	5,77
Papua	63,25	79,73	25,31	16,84	11,44	3,43
Indonesia	75,21	77,01	18,31	17,41	6,47	5,58

Lampiran 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

D		Februari			Agustus	
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	18,20	48,18	33,36	19,27	52,77	36,22
Sumatera Utara	15,12	37,47	26,47	16,31	39,15	27,91
Sumatera Barat	16,64	45,77	31,58	16,44	50,31	33,81
Riau	15,65	48,64	31,64	14,43	54,03	33,62
Jambi	12,95	47,95	30,09	12,81	52,67	32,33
Sumatera Selatan	14,68	42,69	28,49	13,86	44,26	28,85
Bengkulu	14,24	37,72	25,75	13,62	39,23	26,17
Lampung	1 2, 87	45,85	28,87	13,14	52,03	32,00
Bangka-Belitung	13,58	50,19	31,08	13,88	50,87	31,57
Kepulauan Riau	13,84	50,82	31,86	13,71	52,31	32,52
DKI Jakarta	16,85	47,56	32,06	15,44	46,13	30,64
Jawa Barat	15,73	54,03	34,62 (17,49	58,53	37,73
Jawa Tengah	15,93	39,76	28,06	16,82	41,19	29,23
DIY	20,00	35,42	27,89	21,65	40,39	31,23
Jawa Timur	14,07	42,44	28,61	15,3 0	44,99	30,51
Banten	15,2 0	49,41	31,97	14,00	51,17	32,21
Bali	14,26	28,75	21,51	15, 80	31,29	23,55
Nusa Tenggara Barat	16,65	42,56	30,31	17,12	48,91	33,88
Nusa Tenggara Timur	15,53	33,79	24,90	17,21	38,75	28,28
Kalimantan Barat	13,49	37,07	25,03	13,71	38,96	26,07
Kalimantan Tengah	11,89	42,61	26,49	11,95	43,84	27,11
Kalimantan Selatan	13,20	45, 60	29,32	12,06	41,47	26,69
Kalimantan Timur	13,57	53,63	32,34	10,07	55,78	31,49
Sulawesi Utara	15,61	55,63	35,29	16,04	53,94	34,68
Sulawesi Tengah	12,34	41,72	26,69	11,74	42,74	26,89
Sulawesi Selatan	15,77	52,52	34,99	15,14	54,4 0	35,68
Sulawesi Tenggara	12,40	42,48	27,58	12,28	44, 60	28,58
Gorontalo	18,15	53,82	36,10	16,78	54,72	35,88
Sulawesi Barat	12,44	35,16	23,92	13,76	41,40	27,73
Maluku	18,24	42,87	30,57	17,47	43,54	30,53
Maluku Utara	15,72	44,39	29,76	16,72	49,02	32,55
Papua Barat	15,62	43,32	28,50	16,20	44,2 0	29,22
Papua	11,67	26,15	18,49	12,56	31,64	21,55
Indonesia	15,14	44,87	30,04	15,70	47,56	31,66

Lampiran 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari dan Agustus 2011 (Persen)

		(P	ersen)			
Provinsi	Pendidik Keba		Pendidikan	Menengah	Pendidika	an Tinggi
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Aceh	58,10	58,05	30,59	29,68	11,31	12,27
Sumatera Utara	62,05	60,15	29,68	32,52	8,27	7,33
Sumatera Barat	61,16	61,67	29,02	28,11	9,81	10,21
Riau	58,76	61,69	31,79	29,81	9,45	8,5 0
Jambi	69,46	67,25	22,23	22,76	8,31	9,98
Sumatera Selatan	69,99	69,92	23,43	22,65	6,58	7,42
Bengkulu	68,47	63,50	24,62	26,71	6,91	9,80
Lampung	74,16	70,41	19,27	22,93	6,57	6,65
Bangka-Belitung	68,13	65,27	24,29	26,37	7,57	8,36
Kepulauan Riau	51,42	42,99	39,76	43,42	8,82	13,59
DKI Jakarta	34,48	39,13	45,04	43, 70	20,48	17,17
Jawa Barat	67,70	68,97	25,08	23,56	7,22	7,47
Jawa Tengah	75,01	75,32	18,68	18,64	6,31	6,04
DIY	51,61	51,52	36,89	34,88	11,50	13,60
Jawa Timur	72,14	72,53	20,84	21,35	7,02	6,11
Banten	59,39	59,95	29,70	30,42	10,91	9,63
Bali	61,35	58,54	30,05	30,59	8,61	10,87
Nusa Tenggara Barat	71,97	71,55	22,28	19,60	5,74	8,85
Nusa Tenggara Timur	78,04	76,81	16,33	16,05	5,63	7,14
Kalimantan Barat	77,27	76,28	17,21	18,80	5,52	4,92
Kalimantan Tengah	72,37	70,83	19,14	20,19	8,49	8,98
Kalimantan Selatan	72,10	72,21	20,27	20,48	7,63	7,31
Kalimantan Timur	52,32	53,91	35,42	35,96	12,26	10,12
Sulawesi Utara	60,20	58,01	30,54	32,59	9,26	9,40
Sulawesi Tengah	67,26	70,14	23,20	21,97	9,53	7,89
Sulawesi Selatan	65,34	66,10	23,31	23,40	11,36	10,50
Sulawesi Tenggara	63,61	63,32	25,22	25,82	11,17	10,86
Gorontalo	75,16	73,72	17,50	18,30	7,35	7,97
Sulawesi Barat	73,51	74,43	18,45	17,65	8,04	7,92
Maluku	65,21	60,44	26,37	29,42	8,42	10,15
Maluku Utara	65,72	64,54	24,76	25,51	9,52	9,95
Papua Barat	62,59	59,53	26,85	28,04	10,56	12,43
Papua	75,39	74,09	18,72	19,03	5,89	6,88
Indonesia	67,06	67,10	24,65	24,75	8,30	8,15

Lampiran 17. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011
(Rupiah)

Lapangan		Februari			Agustus	
Usaha	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	1 129 260	696 420	1 045 991	1 100 895	755 865	1 027 386
2	2 941 937	2 107 525	2 911 844	2 873 704	2 011 852	2 822 807
3	1 326 461	946 042	1 188 962	1 382 772	965 441	1 224 957
4	2 163 185	3 184 118	2 272 853	2 192 413	1 839 248	2 139 990
5	1 367 942	2 621 880	1 418 437	1 442 480	1 436 214	1 442 207
6	1 254 915	976 221	1 165 524	1 352 555	1 018 075	1 224 226
7	1 809 604	2 307 877	1 881 186	1 674 076	2 046 511	1 714 909
8	2 086 359	2 200 504	2 120 887	2 173 276	2 223 956	2 187 562
9	1 991 794	1 363 264	1 677 400	2 036 702	1 473 838	1 762 710
Total	1 640 472	1 275 653	1 510 568	1 659 546	1 291 753	1 529 161

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 18 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, Februari dan Agustus 2011 (Rupiah)

Lapangan		Februari			Agustus	
Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	1 298 277	960 195	1 045 991	1 202 493	979 015	1 027 386
2	4 015 101	1 643 229	2 911 844	3 757 101	1 955 903	2 822 807
3	1 276 806	944 955	1 188 962	1 315 343	960 694	1 224 957
4	2 478 510	1 446 244	2 272 853	2 230 438	1 836 843	2 139 990
5	1 569 807	1 118 308	1 418 437	1 568 918	1 198 959	1 442 207
6	1 228 216	866 956	1 165 524	1 294 712	900 320	1 224 226
7	2 052 101	1 238 302	1 881 186	1 892 307	1 202 644	1 714 909
8	2 272 571	1 215 281	2 120 887	2 321 629	1 333 297	2 187 562
9	1 749 858	1 499 098	1 677 400	1 862 145	1 524 735	1 762 710
Total	1 637 403	1 209 516	1 510 568	1 661 616	1 224 845	1 529 161

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Lampiran 19. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, Februari dan Agustus 2011 (Rupiah)

Dunasiani		Februari			Agustus	
Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Aceh	1 539 817	1 423 133	1 497 451	1 572 186	1 427 665	1 522 588
Sumatera Utara	1 493 125	1 273 170	1 425 419	1 534 370	1 275 797	1 437 465
Sumatera Barat	1 666 725	1 596 295	1 640 611	1 703 726	1 611 682	1 668 500
Riau	1 841 774	1 501 299	1 739 875	1 903 672	1 502 456	1 781 155
Jambi	1 436 826	1 156 003	1 349 584	1 446 584	1 182 711	1 359 784
Sumatera Selatan	1 493 090	1 244 537	1 418 640	1 500 841	1 333 438	1 447 395
Bengkulu	1 650 708	1 349 853	1 549 197	1 651 061	1 398 021	1 557 309
Lampung	1 208 564	1 066 041	1 166 095	1 262 189	1 066 394	1 198 616
Bangka-Belitung	1 613 396	1 225 721	1 509 470	1 674 904	1 227 651	1 529 081
Kepulauan Riau	2 373 438	1 832 964	2 178 240	2 444 093	1 833 879	2 244 171
DKI Jakarta	2 264 010	1 703 000	2 052 692	2 281 690	1 734 315	2 076 158
Jawa Barat	1 633 266	1 296 810	1 510 984	1 636 048	1 299 944	1 526 691
Jawa Tengah	1 326 365	983 584	1 182 127	1 349 080	984 129	1 197 631
DIY	1 538 664	1 141 578	1 360 667	1 541 082	1 180 743	1 394 960
Jawa Timur	1 327 062	1 009 045	1 207 812	1 352 237	1 010 097	1 223 616
Banten	1 871 413	1 462 807	1 738 276	1 922 067	1 465 094	1 764 241
Bali	1 702 661	1 254 386	1 544 768	1 706 763	1 398 781	1 589 705
Nusa Tenggara Barat	1 456 815	1 046 540	1 319 832	1 493 608	1 051 197	1 347 119
Nusa Tenggara Timur	1 581 384	1 371 190	1 505 166	1 585 389	1 467 203	1 543 582
Kalimantan Barat	1 507 296	1 168 162	1 413 186	1 516 981	1 215 385	1 429 713
Kalimantan Tengah	1 785 841	1 503 304	1 707 732	1 789 915	1 531 842	1 712 772
Kalimantan Selatan	1 718 522	1 295 559	1 594 890	1 728 658	1 357 618	1 619 964
Kalimantan Timur	2 325 572	1 633 584	2 132 315	2 346 400	1 638 544	2 164 341
Sulawesi Utara	1 668 094	1 765 509	1 695 246	1 736 237	1 768 438	1 747 201
Sulawesi Tengah	1 552 440	1 302 051	1 455 044	1 556 904	1 361 032	1 485 047
Sulawesi Selatan	1 682 011	1 360 476	1 556 875	1 682 575	1 411 535	1 582 682
Sulawesi Tenggara	1 780 285	1 433 665	1 662 104	1 784 721	1 467 137	1 679 352
Gorontalo	1 422 847	1 216 422	1 334 533	1 425 460	1 276 702	1 361 920
Sulawesi Barat	1 444 793	1 100 344	1 341 809	1 501 414	1 112 451	1 367 908
Maluku	1 750 343	1 705 326	1 735 826	1 808 928	1 708 981	1 772 207
Maluku Utara	1 867 005	1 643 985	1 795 772	1 911 290	1 658 170	1 825 619
Papua Barat	2 085 968	1 870 396	2 031 521	2 093 318	1 876 339	2 034 297
Papua	2 525 447	1 910 400	2 359 770	2 606 538	1 911 721	2 405 549
Indonesia	1 640 472	1 275 653	1 510 568	1 659 546	1 291 753	1 529 161

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, Februari dan Agustus 2011 (Rupiah)

Don't de		Februari			Agustus	
Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Aceh	1 755 998	1 314 490	1 497 451	1 779 626	1 325 169	1 522 588
Sumatera Utara	1 507 562	1 267 309	1 425 419	1 525 783	1 283 572	1 437 465
Sumatera Barat	1 812 417	1 440 390	1 640 611	1 819 795	1 457 258	1 668 500
Riau	2 070 954	1 352 335	1 739 875	2 130 696	1 395 852	1 781 155
Jambi	1 563 240	1 205 666	1 349 584	1 570 820	1 215 167	1 359 784
Sumatera Selatan	1 648 425	1 168 730	1 418 640	1 655 614	1 172 276	1 447 395
Bengkulu	1 748 938	1 288 843	1 549 197	1 798 848	1 339 962	1 557 309
Lampung	1 393 359	1 009 977	1 166 095	1 419 834	1 042 988	1 198 616
Bangka-Belitung	1 639 513	1 307 803	1 509 470	1 650 569	1 326 254	1 529 081
Kepulauan Riau	2 254 646	1 519 359	2 178 240	2 321 638	1 602 333	2 244 171
DKI Jakarta	2 052 692		2 052 692	2 076 158		2 076 158
Jawa Barat	1 590 997	1 118 197	1 510 984	1 622 235	1 145 680	1 526 691
Jawa Tengah	1 269 390	1 017 547	1 182 127	1 288 345	1 032 756	1 197 631
DIY	1 393 246	1 246 960	1 360 667	1 425 954	1 276 201	1 394 960
Jawa Timur	1 303 449	966 417	1 207 812	1 322 314	999 142	1 223 616
Banten	1 848 286	1 109 531	1 738 276	1 883 713	1 127 107	1 764 241
Bali	1 657 185	1 294 182	1 544 768	1 676 828	1 337 727	1 589 705
Nusa Tenggara Barat	1 412 817	1 179 519	1 319 832	1 431 905	1 184 778	1 347 119
Nusa Tenggara Timur	1 672 745	1 372 963	1 505 166	1 700 711	1 397 607	1 543 582
Kalimantan Barat	1 546 212	1 278 030	1 413 186	1 555 294	1 290 640	1 429 713
Kalimantan Tengah	2 074 845	1 380 556	1 707 732	2 092 034	1 407 818	1 712 772
Kalimantan Selatan	1 744 141	1 416 941	1 594 890	1 763 073	1 428 833	1 619 964
Kalimantan Timur	2 225 232	1 908 413	2 132 315	2 257 330	1 932 748	2 164 341
Sulawesi Utara	1 803 543	1 556 439	1 695 246	1 843 384	1 589 141	1 747 201
Sulawesi Tengah	1 579 106	1 360 268	1 455 044	1 615 635	1 380 896	1 485 047
Sulawesi Selatan	1 771 614	1 272 802	1 556 875	1 785 949	1 298 518	1 582 682
Sulawesi Tenggara	1 910 519	1 441 679	1 662 104	1 939 780	1 466 370	1 679 352
Gorontalo	1 485 185	1 107 500	1 334 533	1 531 103	1 139 228	1 361 920
Sulawesi Barat	1 425 923	1 282 843	1 341 809	1 455 317	1 309 526	1 367 908
Maluku	1 793 795	1 666 701	1 735 826	1 822 478	1 683 569	1 772 207
Maluku Utara	2 114 946	1 568 966	1 795 772	2 116 371	1 574 231	1 825 619
Papua Barat	2 122 502	1 846 208	2 031 521	2 205 656	1 936 533	2 034 297
Papua	2 401 606	2 290 199	2 359 770	2 452 032	2 323 759	2 405 549
Indonesia	1 637 403	1 209 516	1 510 568	1 661 616	1 224 845	1 529 161

Batasan Kegiatan Informal

				Jenis P	ekerjaa	Jenis Pekerjaan Utama				
Status Pekerjaan	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	щ	щ	L	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	J	J	Ħ	F	F	J	J	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	£	£	4	F	F	£	£	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	J	INF	JNI	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Non Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan : F = Formal

INF=Informal